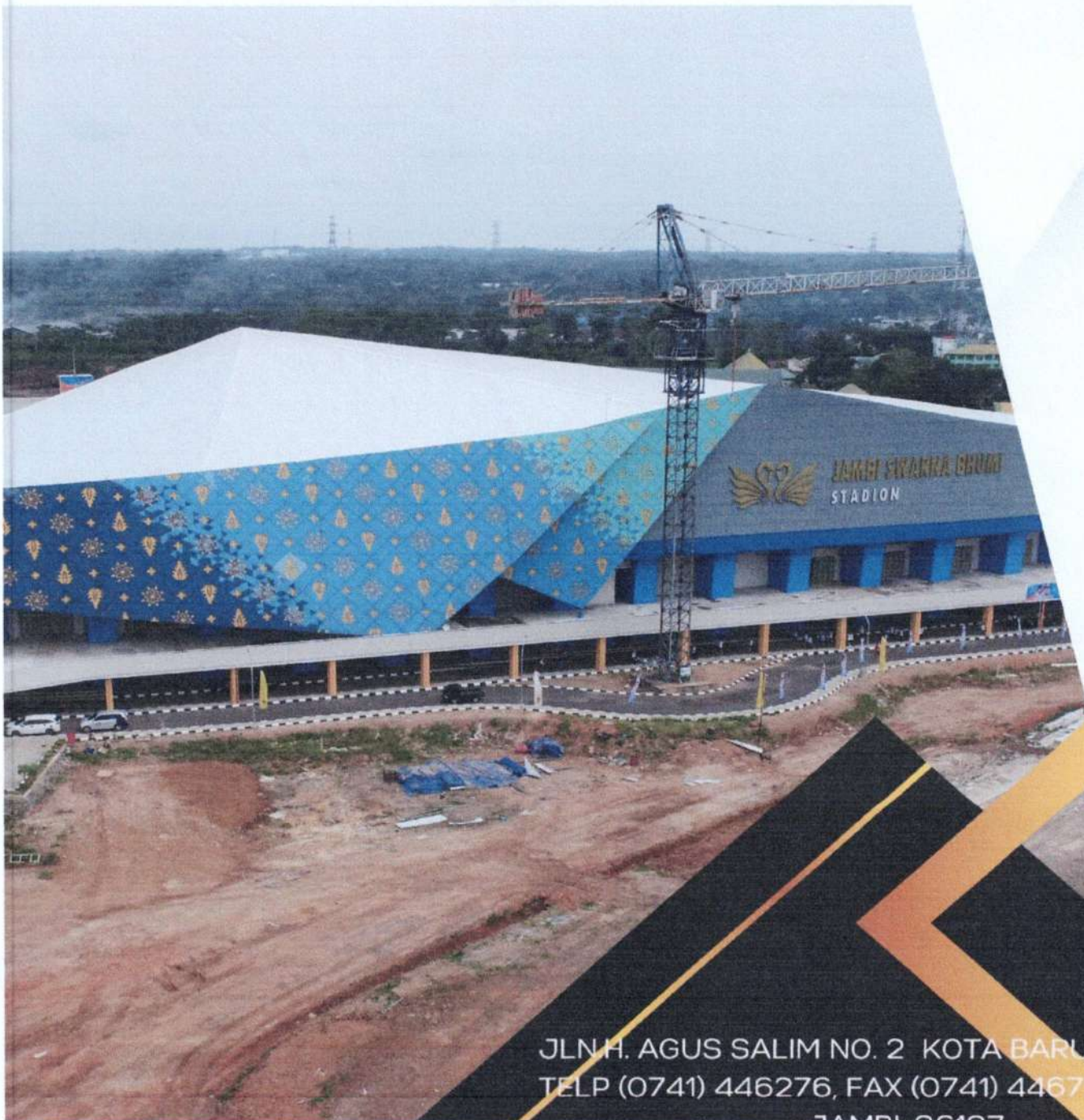


**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 20 Januari 2026

Kepala Dinas,



MUZAKIR, M.Si., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730302 200604 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja awal 2025, dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - a. Persentase Pengurangan Daya Rusak Air mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 28,27%, dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar 21,88%.
 - b. Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 65,78% dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi sebesar 66,83%.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi dengan indikator Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah 83,87%, dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar 69,385%.
3. Sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik pada tahun 2025 adalah 7 unit, dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar 9 unit.

4. Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah dengan indikator Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang, mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 80%, memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar 75%.
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan indikator Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 10,41 Hektar, dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar 1,05 Hektar.
6. Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 85%, dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar 82,16%.
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 83,05% dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi sebesar 83,97%.
7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - a. Predikat Akuntabilitas Kinerja mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar BB (76 Predikat), dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar BB (77 Predikat).
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 91,90% dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi sebesar 92,05%.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan 2025, dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah N/A, dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar N/A.
2. Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - a. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 70,01, dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar 81,40.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 91,90% dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi sebesar 92,05%.
 - c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 75 Predikat dan memperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi sebesar 77 Predikat.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.
2. Perlunya Peningkatan kualitas dalam perencanaan program pada setiap kegiatan yang ada agar lebih terkendali dan dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran.
3. Perlunya konsistensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis	4
1.3.1 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Updating Renstra Tahun 2021-2026	4
1.3.2 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Updating Renstra Tahun 2025-2029	6
1.4 Keadaan Pegawai	7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	11
1.6 Keuangan	14
1.7 Sistematika LKj IP	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	36
2.3.1 Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	37
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	37
2.4 Instrumen Pendukung	39
2.4.1 Sistem Informasi (Aplikasi Internal yang digunakan oleh OPD)	40
2.4.2 Sistem Informasi (Aplikasi Internal yang diciptakan oleh OPD)	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	47
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	51
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	51
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	56
3.2.3 Sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	60
3.2.4 Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	64
3.2.5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	68
3.2.6 Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	71
3.2.7 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	77
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Perubahan	85
3.3.1 Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	85
3.3.2 Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	86
3.4 Capaian Program dan Penunjang Kinerja	88
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	91

3.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	93
3.7	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Tindak Lanjut Tahun 2025	93
3.8	Realisasi Anggaran	95
BAB IV PENUTUP.....		97
LAMPIRAN		101
Lampiran 1	Matriks Renstra 2021-2026 (Tujuan dan Sasaran).....	101
	Matriks Renstra 2025-2029 (Tujuan dan Sasaran)	103
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal).....	107
	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan)	109
Lampiran 3	Matriks Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Awal	112
	Matriks Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan	113
Lampiran 4	Tanggapan/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya	115
Lampiran 5	Penghargaan yang diterima	125

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025	12
Tabel 1.2	Tugas Pembantuan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025.....	15
Tabel 1.3	Tugas Pembantuan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025.....	15
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029	20
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	28
Tabel 2.4	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	35
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
Tabel 2.7	Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2025.....	37
Tabel 2.8	Anggaran Belanja Modal dan Operasi per Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.....	37
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	47
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025.....	48
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas PUPR TA 2025.....	50
Tabel 3.2.1	Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2025.....	52
Tabel 3.2.2	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air dan Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	52
Tabel 3.2.3	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air dan Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2023-2025.....	54
Tabel 3.2.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi pada Tahun 2025.....	57
Tabel 3.2.5	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	57
Tabel 3.2.6	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	58
Tabel 3.2.7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah pada Tahun 2025.....	61
Tabel 3.2.8	Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang Berfungsi dengan Baik.....	61
Tabel 3.2.9	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Renstra Dinas PUPR Indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang Berfungsi dengan Baik.....	62
Tabel 3.2.10	Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah Tahun 2025.....	65
Tabel 3.2.11	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah Tahun 2025.....	65
Tabel 3.2.12	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang.....	66
Tabel 3.2.13	Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2025.....	69
Tabel 3.2.14	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2025	69

Tabel 3.2.15	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Pengurangan Luas Kawasan Permukiman.....	70
Tabel 3.2.16	Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2025.....	73
Tabel 3.2.17	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2025.....	73
Tabel 3.2.18	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase Rumah Tangga, dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan.	75
Tabel 3.2.19	Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	79
Tabel 3.2.20	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	79
Tabel 3.2.21	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat	81
Tabel 3.3.1	Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel Tahun 2025	86
Tabel 3.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel pada Tahun 2025	87
Tabel 3.3.3	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks), dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87
Tabel 3.4.1	Capaian Program Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR TA 2025	89
Tabel 3.4.2	Capaian Kegiatan Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR TA 2025	89
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	91
Tabel 3.6	Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP T.A 2025	93
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran DPUPR T.A 2025	95

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.....	2
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Struktural Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025.....	8
Gambar 1.3	Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Golongan di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025	9
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025.....	10
Gambar 1.5	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025.....	11
Gambar 2.1	Aplikasi E-Paket Provinsi Jambi.....	40
Gambar 2.2	Aplikasi E-Paksi.....	40
Gambar 2.3	Aplikasi SIPJAKI.....	41
Gambar 2.4	Aplikasi SIPD.....	41
Gambar 2.5	Aplikasi SiRUP.....	42
Gambar 2.6	Aplikasi E-SPM.....	42
Gambar 2.7	Aplikasi Srikandi.....	43
Gambar 2.8	Aplikasi PPID.....	43
Gambar 2.9	Aplikasi E-Kinerja.....	44
Gambar 2.10	Aplikasi E-Monev.....	45
Gambar 2.11	Aplikasi Awasi.....	45
Gambar 2.12	Aplikasi E-Proporsi.....	46
Gambar 2.13	Aplikasi MyPerkim.....	46
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air Tahun 2023-2025	53
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2023-2025.....	53
Gambar 3.3	Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi Tahun 2023-2025.....	57
Gambar 3.4	Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Tahun 2023-2025.....	61
Gambar 3.5	Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah Tahun 2023-2025.....	65
Gambar 3.6	Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2023-2025	69
Gambar 3.7	Grafik Realisasi Rasio Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dengan Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan.....	74
Gambar 3.8	Grafik Realisasi Rasio Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dengan Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan.....	74
Gambar 3.9	Grafik Realisasi Predikat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023-2025	80
Gambar 3.10	Grafik Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023-2025	80

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-isu strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi.
2. Mendorong Dinas PUPR Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas PUPR Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal penetapan 18 Maret 2025, selanjutnya melalui mekanisme APBD-Perubahan pelaksanaan anggaran DPA-P berdasarkan Perda APBD-P 2025 Nomor 8 Tahun 2025 tanggal ditetapkan dan diundangkan 04 November 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58) dan Peraturan Gubernur APBD-P 2025 Nomor 20 Tahun 2025 tanggal ditetapkan dan diundangkan 05 November 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 20) Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 20.

1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, perencanaan dan

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah terpenuhinya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur, dan yang kedua adalah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan, dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya dibandingkan proses teknokratisnya.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-Isu Strategis

1.3.1 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Updating Renstra Tahun 2021-2026

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Bidang ke-PU-an yang Handal dan berkelanjutan" sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Updating Renstra Periode 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Perwujudan jalan kondisi mantap belum tercapai;
2. Rencana daerah dalam meningkatkan konektivitas baru melalui Pembangunan jalan baru;
3. Standarisasi teknis pelayanan minimal jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jambi;
4. Akses Air minum layak dan kendala Pembangunan SPAM regional belum terwujud;

5. Akses Sanitasi layak dan Kendala Pembangunan SPAL-D regional belum terwujud;
6. Konservasi sumber daya air mengakibatkan berkurangnya tutupan lahan;
7. Kurang optimalnya pendayagunaan sumber daya air yang berakibat penurunan fungsi jaringan irigasi;
8. Standarisasi teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah;
9. Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni;
10. Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi program pemerintah;
11. Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi program pemerintah;
12. Penanganan kerentanan bencana dan kebutuhan infrastruktur penanganan;
13. Pengendalian daya rusak air yang belum berjalan dengan baik;
14. Rendahnya implementasi pemanfaatan ruang (kesesuaian program Pembangunan);
15. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum berjalan optimal;
16. Pengelolaan pertanahan; dan
17. Kualitas dan kompetensi SDM jasa konstruksi;

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi membuat beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan serta dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, seperti sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan peningkatan efektifitas pemanfaatan semua sumberdaya untuk peningkatan pelayanan jalan Provinsi.
2. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan jaringan irigasi, penanggulangan daya rusak air, dan jaringan drainase perkotaan.
3. Memprioritaskan penanganan Kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi dengan orientasi Tingkat kekumuhan.
4. Pemantapan kerangka kerja peningkatan kualitas bangunan Gedung strategis daerah Provinsi.
5. Peningkatan sinkronisasi pengembangan SPAM daerah Kabupaten/ Kota berbatasan

6. Meningkatkan peran Bidang Bina Konstruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

1.3.2 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Updating Renstra 2025-2029

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah dan “Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan” sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi jalan eksisting belum mantap dan tantangan kebutuhan penyiapan konektivitas baru.
2. Capaian akses perpipaan masih rendah dan Pembangunan SPAM Regional belum terealisasi.
3. Capaian akses sanitasi layak masih dibawah target nasional dan Pembangunan SPAL-D Regional belum terealisasi.
4. Masih terdapat penyelenggaraan bangunan Gedung milik daerah yang belum sesuai standar.
5. Masih terdapatnya Kawasan permukiman dengan kualitas buruk.
6. Menurunnya kinerja jaringan irigasi.
7. Peningkatan kerentanan bencana banjir.
8. Penyelenggaraan penataan ruang yang masih belum optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi membuat beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan serta dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, seperti sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan peningkatan efektifitas pemanfaatan semua sumberdaya untuk peningkatan pelayanan jalan Provinsi.

2. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan jaringan irigasi kewenangan, penanggulangan daya rusak air, dan Pembangunan system pengendali banjir di WS Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. - Mengurangi Kawasan permukiman kumuh;
- Merehabilitasi dan merelokasi rumah korban bencana alam
- Membangun dan mengembangkan sistem prasarana permukiman di Kawasan Strategis Provinsi.
- Peningkatan kualitas konstruksi dan arsitektural bangunan Gedung strategis Provinsi.
4. Peningkatan sinkronisasi pengembangan SPAM daerah Kabupaten/Kota berbatasan di Sungai Penuh-Kerinci dan Perkotaan Jambi.
5. Meningkatkan peran Bidang Bina Konstruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
6. Pemenuhan penetapan Produk Hukum Rencana Tata Ruang dan peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan sosialisasi regulasi tata ruang.
7. Penyiapan proses pengadaan tanah sebelum Pembangunan bagi kepentingan umum.
8. Peningkatan efektifitas kerja dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi.

1.4 Keadaan Pegawai

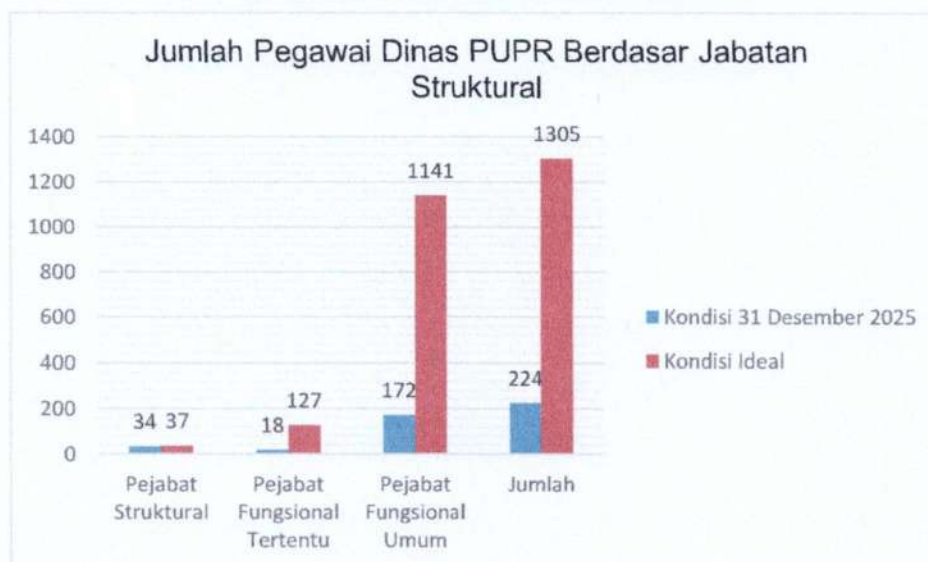
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol, pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebanyak **224 Pegawai Negeri Sipil** dan sebanyak **550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu** dan **73 Pegawai yang belum masuk ke dalam kategori PPPK Paruh Waktu**. Adapun jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari **34 pejabat struktural**, **18 pejabat fungsional tertentu** meliputi: 2 orang fungsional penyehatan lingkungan, 3 orang fungsional jalan dan jembatan, 3 orang fungsional tata bangunan, 2 orang fungsional arsiparis, 5 orang fungsional sumber daya air, 1 orang fungsional penata laksana barang, 1 orang fungsional jasa konstruksi, 1 orang fungsional kepegawaian dan **172 pejabat fungsional umum**.

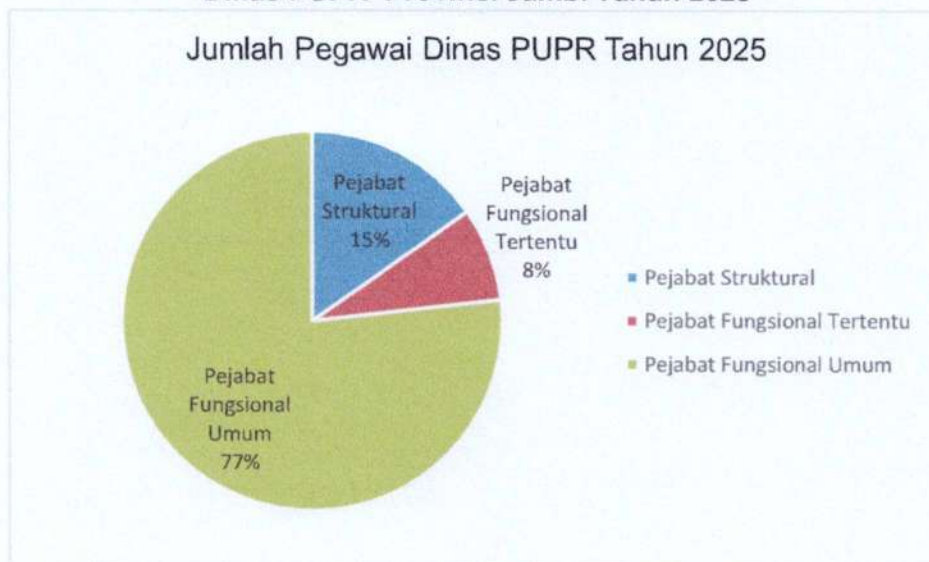
Profil Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2025 dapat dilihat pada diagram-diagram berikut ini:

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2025

Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2025

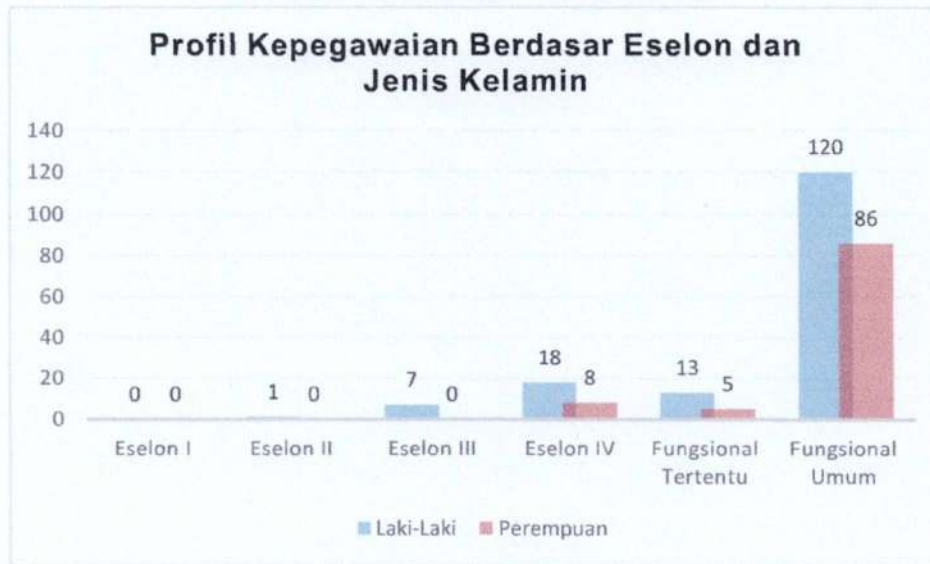
Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Golongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Golongan I : 0 Orang
- Golongan II : 34 Orang
- Golongan III : 166 Orang
- Golongan IV : 24 Orang

Berdasarkan kedua grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2025 masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai, dimana untuk posisi jabatan Struktural terpenuhi 34 orang dari kebutuhan sebanyak 37 orang, terdapat kekosongan jabatan eselon III sebanyak 1 orang karena Purna bakti/pensiun, jabatan fungsional tertentu baru terpenuhi 18 orang dari jumlah kebutuhan sebanyak 127 orang dan masih diperlukan 109 orang lagi, begitu juga dengan jabatan fungsional umum baru terpenuhi 172 orang dari jumlah kebutuhan sebanyak 1141 orang artinya masih diperlukan sebanyak 969 orang lagi. Bila kebutuhan jabatan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan jumlah kebutuhan, maka dapat memberikan kinerja secara maksimal.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

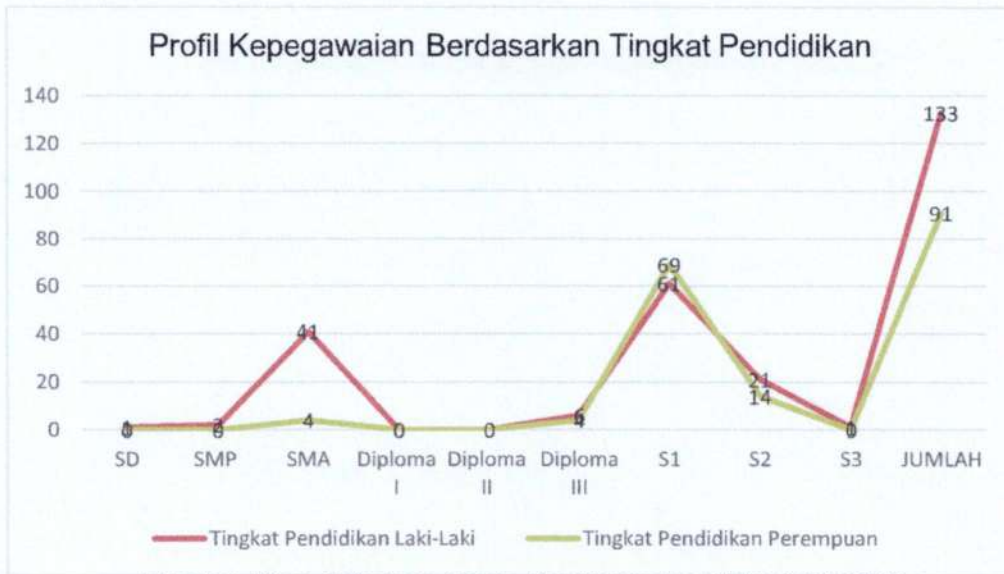
Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2025

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa terkait kesetaraan gender di Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 jumlah PNS kaum perempuan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 8 orang eselon IV, untuk jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 orang, fungsional umum sebanyak 86 orang, atau sekitar 29,63% kaum perempuan menduduki eselon IV dan sekitar 27,78% sebagai Fungsional Tertentu (Penyehatan Lingkungan, Tata Bangunan dan Perumahan, Arsiparis, Pengelola Sumber Daya Air, Pembina Jasa Konstruksi), maka dapat dikatakan bahwa Gender di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang. Profil kepegawaian Dinas PUPR Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.5 Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2025

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas PUPR Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 sebanyak 130 orang dan Sarjana S2 sebanyak 35 orang sementara terkait dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) membutuhkan pendidikan sarjana yang membutuhkan kapabilitas yang tinggi.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi di Dinas PUPR Provinsi Jambi, meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas PUPR Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini, aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Provinsi Jambi
Tahun 2025**

No.	Uraian	Banyak	Nilai Input (Rp)
I.	Aset Tetap		
1.	Tanah	17 Bidang	155.711.309.110
2.	Peralatan dan Mesin	2.098 Unit	129.610.410.798
3.	Gedung dan Bangunan	20 Unit	434.900.922.828
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.660 Unit	8.415.894.757.992
5.	Aset Tetap Lainnya	1.022 Unit	212.896.100.366
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	50 Unit	
	Akumulasi Penyusutan		4.957.993.286.740
	Jumlah s/d 31 Desember 2025	6.867 Unit	4.570.517.679.786
II.	Aset Lainnya		
1.	Aset Lain-lain	2.537 Unit	465.979.002.672
2.	Aset Tidak Berwujud	32 Unit	6.476.069.584
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		1.417.006.305
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		15.104.790.247
	Jumlah s/d 31 Desember 2025	3.569 Unit	455.933.275.703

Sumber: Seksi Aset dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Umumnya secara akuntansi, pencatatan Aset Tetap dibedakan berdasarkan jenis dan dipisahkan dalam beberapa Kartu Inventaris Barang (KIB). Pada tahun 2025, KIB A (Tanah) tidak mengalami penambahan dikarenakan secara akuntansi, ada nilai aset yang dikeluarkan akibat masuk pada utang. Pada KIB B (Peralatan dan Mesin) mengalami penambahan dikarenakan adanya Belanja Modal Kendaraan Dinas dan beberapa perlengkapan untuk rumah dinas Kepala Dinas, antara lain seperti: tempat tidur, sofa, dll. Pada beberapa bidang, terdapat penambahan beberapa

peralatan dan mesin berupa AC, TV, dan peralatan kantor lainnya untuk menunjang pekerjaan dan memberikan rasa nyaman terhadap pegawai.

Pada KIB C (Gedung dan Bangunan) terjadi penambahan angka aset dikarenakan adanya pembangunan Belanja Modal yang diperuntukkan sebagai pembangunan Stadion Swarnabhumi. Sedangkan di KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan), Dinas PUPR memiliki beberapa item Belanja Modal yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi ruas jalan milik Pemerintah Provinsi.

Berbeda dengan kondisi KIB yang lain, pada KIB E (Aset Tetap Lainnya) terjadi pengurangan nilai neraca. Hal ini disebabkan pada KIB E terdapat Aset Tetap Renovasi (ATR) yang sudah diserahterimakan kepada beberapa pihak yang berwenang. Perlu diketahui bahwa ATR merupakan pekerjaan belanja modal yang dilakukan oleh Dinas PUPR, namun bangunan induknya bukan milik Dinas PUPR. Secara akuntansi, pekerjaan seperti itu harus dilakukan serah terima kepada pihak yang berhak.

Pada KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan), terjadi penambahan nilai dikarenakan adanya beberapa kontrak proyek *multi-years* (selesai dalam beberapa tahun). Beberapa di antaranya adalah Jl. Sp. Masurai - Koto Tapus, Jl. Sungai Duren - Sungai Buluh, Jl. Simp. Betung Bedarah - Simp. Pintas - Batas Kab. Tebo/Batas Kab. Bungo, dan beberapa kontrak lainnya. Secara akuntansi, apabila kontrak disepakati selesai dalam beberapa tahun ke depan, maka harus dicatat dalam KIB F.

Sementara itu, terjadi penurunan nilai neraca pada bagian Aset Lainnya. Hal ini dikarenakan adanya koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jambi saat dilakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi kemarin. Dari instruksi BPK, didapati bahwa aset peralatan dan mesin yang bernilai di bawah nilai kapitalisasi sesuai aturan yang berlaku saat ini, yakni Rp 1.250.000,00, harus dihapuskan dari KIB. Sebagai tambahan informasi, aset yang bernilai di bawah nominal tersebut, harusnya tidak dimasukkan dalam Buku Inventaris (BI) atau KIB, melainkan dimasukkan dalam BI aset *ekstracountable*.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas PUPR Provinsi Jambi mendapatkan alokasi APBD-murni sebesar **Rp 367.990.506.924,00** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp. 220.611.431.572,60** dan belanja modal sebesar **Rp. 147.379.075.351,40** kemudian melalui mekanisme APBD-Pergeseran T.A 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 294.754.047.467,00** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp 169.243.214.468,00** dan belanja modal sebesar **Rp 125.510.832.999,00** dan melalui mekanisme APBD-Perubahan T.A 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 359.894.299.689,00** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp 220.611.431.572,60** dan rincian belanja modal **Rp 147.379.075.351,40** yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang didukung oleh 15 program, 30 Kegiatan, dan 96 sub kegiatan.

Selain Dana APBD, tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi juga mengelola Dana APBN berupa Dana Tugas Pembantuan sebesar **Rp 5.859.969.000,00** pada Program Ketahanan Sumber Daya Air dan sebesar **Rp 7.070.616.000,00** pada Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan rincian sebagaimana **tabel 1.2** dan **tabel 1.3**

Tabel 1.2 Tugas Pembantuan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Nomor SP DIPA	Nama Program/Kegiatan/Output	Anggaran (Rp.000)		
			Pagu	Realisasi	%
SP-DIPA - 145.03.4.694086/2025 Tgl 2 Desember 2024		Program Ketahanan Sumber Daya Air	5.859.969	5.059.719,295	86,34
		Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	5.859.969	5.059.719,295	86,34
		Output : Terpeliharannya Daerah Irigasi Seluas 7.331,48 Ha.			
		Rincian Kegiatan :			
		- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Administrasi TPOP (ATK)	9.992	-	0,00
		- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Administrasi TPOP (SPPD Luar)	240.008	161.834,295	67,43
		- Layanan Dukungan Manajemen Internal (layanan, dokumen, rekomendasi, unit)	90.720	90.720	100,00
		- Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan/SMOPI DI. Siulak Deras, DI. Batang Sangkir	46.332	-	0,00
		- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	414.840	135.570	32,68
		- Operasi Rutin DI. Siulak Deras (Primer : 34,95 km, Sekunder : 17,8 km), 6.072 Ha	929.780	929.780	100,00
		- Operasi Rutin DI. Batang Sangkir (Primer : 38 km, Sekunder : 14,5 km), 5.965 Ha	442.936	442.936	100,00
		- Pemeliharaan Berkala DI. Siulak Deras	1.750.307	1.567.799	89,57
		- Pemeliharaan Berkala DI. Batang sangkir	1.044.255	840.281	80,47
		- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer DI Siulak Deras	400.915	400.915	100,00
		- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder DI Siulak Deras	39.120	39.120	100,00
		- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer DI Batang Sangkir	217.604	217.604	100,00
		- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder DI Batang Sangkir	233.160	233.160	100,00
Jumlah	5.859.969	5.059.719	86,34		

Sumber : Bidang Sumber Daya Air, 2025

Tabel 1.3 Tugas Pembantuan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Nomor SP DIPA	Nama Program/Kegiatan/Output	Anggaran (Rp.000)		
			Pagu	Realisasi	%
SP DIPA-145.04.4.693759/2025		Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	6.983.055	6.981.164	99,97
		Dukungan Teknis (Dokumen)	187.460	186.538	99,51
		- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Infrastruktur Konektivitas	187.460	186.538	99,51
		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	6.655.687	6.654.717	99,99
		- Pemel. Rutin jalan dan jembatan bts. Kota Jambi-Simp. Candi Muaro Jambi- Zona Lima (Simp. Pelabi) - Muaro Sabak	1.568.477	1.568.002	99,97
		- Pemel. Rutin jalan dan jembatan bts. Kota Jambi-Simp. Candi Muaro Jambi- Zona Lima (Simp. Pelabi) - Muaro Sabak	5.087.210	5.086.715	99,99
		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	139.908	139.908	100,00
		- Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Bts Kota Jambi-Sp.Candi Muaro Jambi-Zona Lima (Sp.Pelabi) - Muara Sabak	139.908	139.908	100,00
		Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	87.519	87.369	99,83
		- Layanan Dukungan Manajemen Internal (layanan, laporan, dokumentasi, rekomendasi, unit)	87.519	87.369	99,83
		- Administrasi Kegiatan	7.593	7.592	99,99
		- Operasi dan Pemeliharaan Kantor Satker Induk	79.926	79.777	99,81
		Jumlah Total	7.070.574	7.068.533	99,97

Sumber : Bidang Bina Marga, 2025

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya

dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025
- 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

2.1 Perencanaan Strategis

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra 2025-2029, Dinas PUPR Provinsi Jambi telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan dan melalui mekanisme pergeseran APBD (Efisiensi) pada bulan April 2025 dan perubahan APBD pada November 2025. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/ perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat Daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Dinas PUPR Provinsi Jambi tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025-2029.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan

selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun kedepan. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas PUPR Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017, Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 26 September 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2021-2026) dengan perencanaan periode yang selanjutnya (2025-2029). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2025-2029 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan *tema* “**JAMBI MANTAP BERKELANJUTAN**”. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2025-2029 seiring dengan masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024-2029. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek **JAMBI MANTAP BERKELANJUTAN**.

Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian,

perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan Pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses Masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.

3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses Pendidikan, Kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

Visi: "Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	Nilai AKIP
					Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas (SPI))
					Indeks SPBE
					Indeks Pelayanan Publik
					Indeks Keterbukaan Informasi
2.	Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas
					Indeks Daya Saing Infrastruktur
				Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi Jambi	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi
					Tingkat inklusi keuangan Provinsi
					Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi	Inflasi
					Rasio kapasitas fiskal daerah
	Pertumbuhan Ekonomi				

Visi: "Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
					Tingkat Pengangguran Terbuka	
					Indeks Ketahanan Pangan	
					Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	
					PDRB Perkapita (juta rupiah perkapita per tahun)	
				Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	
					Distribusi PDRB sektor tersier	
					Rasio PDRB Industri Pengolahan	
					Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan	
				Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi	Indeks Inovasi Daerah	
				3.	Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial
Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini					
Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
Indeks Ekonomi Biru	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Distribusi sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%)				
		Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari				
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkesetaraan gender	Indeks Modal Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk miskin ekstrim di wilayah Pesisir (%)			Usia Harapan Hidup
						Prevalensi Stunting
	Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun				
		Indeks Pembangunan Kebudayaan				
		Indeks Ketimpangan Gender				

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu “Meningkatnya Daya saing Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

➤ Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas PUPR Provinsi Jambi pada Renstra 2021-2026 selama 5 tahun anggaran antara lain **“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-an yang Handal dan Berkelanjutan serta meningkatkan tata kelola Pemerintah yang baik”** dan pada Renstra 2025-2029 selama 5 tahun anggaran antara lain **“Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah dan Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan”**.

➤ Sasaran Strategis Renstra 2021-2026

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persen	77,36	78,92	82,243	83,87	85,25	85,25	
2	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pengelolaan	Persentase meningkatnya indeks kondisi sistem irigasi	Persen	59,87	62,80	64,51	65,78	67,14	67,14	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	sumber daya air	kewenangan Provinsi								
		Persentase pengurangan kawasan banjir dan penanganan daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi	Persen	0%	0%	1,88	28,27	51,54	51,54	
3	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	Ha	13,90	0	2,3	10,41	16,79	16,79	
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan gedung strategis daerah Provinsi	Penyediaan dan peningkatan bangunan gedung strategis daerah Provinsi yang layak fungsi	Unit	0	0	5	7	7	7	
5	Terpenuhinya akses air minum layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan.	Persen	78,06	79,08	83,92	85	87	87	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Rasio tenaga konstruksi yang kompeten	Persen	40,00	47,00	54,00	61,00	68,00	68,00	
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	

➤ **Sasaran Strategis Renstra 2025-2029**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target tahunan						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ke PU an	N/A	2,56	2,61	2,66	2,71	2,76	Indeks
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	74,70	74,98	75,56	76,14	76,85	77,35	%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target tahunan						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.	65,00	66,35	67,69	68,82	70,14	71,93	%
			Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Provinsi yang dilindungi dengan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,74	17,48	38,76	52,31	76,54	82,86	%
			Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Perpipaan, perkotaan dan perdesaan	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	%
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak)	68,84	70	71	73	74	75	%
			Persentase Peningkatan Ketersediaan TPS/TPA/TPS3R/TPST/SPAM di Kawasan Strategis Provinsi	10	10	20	30	40	50	%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target tahunan						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Ketersediaan TPA/TPST/SPALRegional	0	10	20	40	60	80	%
			Persentase Sistem Drainase Perkotaan yang di rehabilitasi	0	5	10	40	70	100	%
			Persentase Bangunan Gedung Strategis Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dipelihara dan dirawat	0	42,11	55,26	71,05	84,21	100	%
			Persentase Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dipelihara dan dirawat	0	42,11	55,26	71,05	84,21	100	%
			Nilai Hasil TURBINLAK Serta kinerja Fungsi dan Manfaat Pada Penyelenggaraan Penataan Ruang		60	64	69	75	81	Skor
			Persentase Tenaga kerja konstruksi tingkat ahli yang bersertifikasi	100	20	40	60	80	100	%
			Persentase Pekerjaan Konstruksi yang di kendalikan	0	20	40	60	80	100	%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target tahunan						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	70,01	71,01	72,01	73,01	74,01	75	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91,90	92,10	92,20	92,3	92,4	92,5	Nilai
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,00	76,00	77,00	78,00	78,50	79,00	Nilai
2.	Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	68,84	70,39	71,95	73,51	75,07	76,63	%
			Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	0,5	18,01	34,84	25,07	23,42	12,7	Ha
			Persentase Rumah Korban Bencana Alam / Rumah Terkena Program Pemerintah Yang Tertangani	0	20	40	60	80	100	%
			Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	30	33,33	50,00	66,67	83,33	100	%
			Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	0	33,33	50	66,67	83,33	100	%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target tahunan						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	70,01	71,01	72,01	73,01	74,01	75,00	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	91,9	92,1	92,2	92,3	92,4	92,5	Nilai
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,00	76,00	77,00	78,00	78,50	79,00	Nilai

Sumber: Renstra 2025-2029

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi Organisasi, adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 dan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Bidang ke-Pu-an yang Handal dan Berkelanjutan serta meningkatkan tata kelola Pemerintah yang baik	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Optimalisasi dan peningkatan efektifitas pemanfaatan semua sumber daya untuk peningkatan pelayanan jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Updating berkala data LHR jalan kewenangan provinsi; • Merumuskan rencana prioritas pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik kondisi dan kebutuhan konektivitas prioritas; • peningkatan kualitas kegiatan koordinasi perencanaan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				<p>pembangunan dan peningkatan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesiapan readiness criteria untuk penyelenggaraan melalui sumber pembiayaan APBN; • Penegasan pembagian tugas Bidang Bina Marga dengan • UPTD Workshop dan Peralatan agar dapat menjaga kualitas infrastruktur jalan terhadap penurunan kondisi; • peremajaan peralatan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan termasuk untuk cepat tanggap perbaikan jalan dan jembatan.
2		<p>Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sumber daya air</p>	<p>Peningkatan efektivitas penyelenggaraan jaringan irigasi, penanggulangan daya rusak air, dan jaringan drainase perkotaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan inventarisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi yang mendukung Lahan Sawah Dilindungi; • Inspeksi berkala terhadap kinerja jaringan irigasi kewenangan provinsi; • Penyiapan data dan informasi potensi daya rusak air di WS kewenangan provinsi; • Penyiapan data dan informasi potensi banjir di WS kewenangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
3		Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Memprioritaskan penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi dengan orientasi tingkat kekumuhan	<p>provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi • Pemantapan data kawasan kumuh kewenangan provinsi; • Penyusunan dokumen rencana penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi; • Prioritas penanganan dari tingkat kumuh berat, sedang, dan rendah.
4		Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Pemantapan kerangka kerja peningkatan kualitas bangunan gedung strategis daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan bangunan gedung strategis daerah provinsi; • Merumuskan prioritas penanganan bangunan gedung strategis daerah provinsi.
5		Terpenuhinya akses air minum layak.	Peningkatan sinkronisasi pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaris kebutuhan pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan; • Perumusan rencana dan peningkatan kualitas dokumen rencana pengembangan SPAM perpipaan daerah kabupaten/kota berbatasan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
6		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Meningkatkan peran Bidang Bina Kontruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja kontruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pelatihan tenaga kerja kontruksi Provinsi Jambi; • Sosialisasi dan koordinasi dengan asosiasi tenaga jasa kontruksi untuk peningkatan keikutsertaan peserta pelatihan.

Sumber : Updating Renstra Periode 2021-2026

**Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun
2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Optimalisasi dan peningkatan efektifitas pemanfaatan semua sumberdaya untuk peningkatan pelayanan jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Updating berkala data VCR jalan kewenangan provinsi; • Merumuskan rencana prioritas pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik kondisi dan kebutuhan konektivitas jangka panjang; • Pembangunan Konektivitas baru; • peningkatan kualitas kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dan peningkatan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan jalan; • Peningkatan kesiapan readiness criteria untuk penyelenggaraan melalui sumber pembiayaan APBN; • Penegasan pembagian tugas Bidang Bina Marga dengan • Peningkatan kinerja UPTD Workshop dan Peralatan dalam menjaga kualitas jalan terhadap penurunan kondisi; • peremajaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan termasuk untuk cepat tanggap perbaikan jalan dan jembatan. • Fasilitasi dan penyiapan readiness criteria pembangunan Jembatan Sungai Rambut.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			<p>Peningkatan efektivitas penyelenggaraan jaringan irigasi kewenangan , penanggulangan daya rusak air, dan Pembangunan sistem pengendali banjir di WS Pengabuan, Kab.Tanjung Jabung Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeksi berkala terhadap kinerja jaringan irigasi kewenangan provinsi; • Penyiapan data dan informasi potensi daya rusak air di WS kewenangan provinsi; • Pematangan design bangunan pengendali banjir di WS Pengabuan • Peningkatan peran pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kawasan permukiman kumuh; • Merehabilitasi dan merelokasi rumah korban bencana alam • Membangun dan mengembangkan sistem prasarana permukiman di Kawasan Strategis Provinsi. • Peningkatan kualitas konstruksi dan arsitektural bangunan gedung strategis provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen rencana penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi; • Rahabilitasi rumah tidak layak huni; • Pemantapan pembagian kewenangan sistem drainase sekunder di Kota Jambi, Muara Bungo, dan Sungai Penuh. • Penyiapan rencana teknis, kelembagaan dan pembangunan sistem prasarana regional • Merehabilitasi Bangunan dan Lingkungan Kawasan pemerintahan olahraga dan pariwisata
			<p>Peningkatan sinkronisasi pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan di Sungai Penuh-Kerinci dan Perkotaan Jambi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan rencana dan peningkatan kualitas dokumen rencana pengembangan SPAM perpipaan daerah kabupaten/kota berbatasan • Pembangunan SPAM Regional di Sungai Penuh-Kerinci
			<p>Meningkatkan peran Bidang Bina Kontruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja kontruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pelatihan tenaga kerja kontruksi Provinsi Jambi; • Sosialisasi dan koordinasi dengan asosiasi tenaga jasa kontruksi untuk peningkatan keikutsertaan peserta pelatihan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Pemenuhan penetapan Produk Hukum Rencana Tata Ruang dan peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan sosialisasi regulasi tata ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan penyiapan RTRW dan RDTR di kabupaten/kota; • Penyiapan perangkat hukum turunan operasionalisasi pengendalian pemanfaatan ruang; • Peningkatan peran dan kinerja Forum Penataan Ruang Daerah. • Meningkatkan kualitas media informasi sosialisasi tata ruang;
			Penyiapan proses pengadaan tanah sebelum Pembangunan bagi kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah; • Penyiapan proses perencanaan pengadaan tanah untuk fasilitas bagi kepentingan umum.
			Peningkatan efektifitas kerja dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sumber daya aparatur yang berintegritas, kompeten, adaptif, dan kolaboratif

Sumber : Renstra 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulai setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program, dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	28,27%
		Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	65,78%
2	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,87%
3	Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	7 Unit
4	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	80%
5	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	10,41 Hektar
6	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Layak, perkotaan dan perdesaan	54%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan	83,05%
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	91,60%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(76 Predikat) BB

Sumber : Updating Renstra Periode 2021-2016

Pada bulan Juni dan Agustus tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan renstra 2025-2029. Perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A
2.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	70,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91,90%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75

Sumber : Renstra 2025-2029

Perjanjian kinerja perubahan ini merupakan dokumen yang menggambarkan tugas dari pemangku jabatan dalam melaksanakan sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat di dalam perjanjian kinerja. Perubahan perjanjian kinerja 2025 di awal tahun maupun perubahannya yaitu pada sasaran dan indikator kinerja yang mana bidang pengampu fisik dijadikan menjadi satu sasaran strategis dengan metode perhitungan kuisioner. Hal ini tidak menyebabkan perbedaan target kinerja pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar **Rp 367.990.506.924,00,-** dengan rincian Belanja Operasi **Rp 220.611.431.572,60,-** dan Belanja Modal **Rp 147.379.075.351,40,-**. Melalui perubahan APBD 2025 terjadi efisiensi anggaran menjadi sebesar

Rp 294.754.047.467,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 169.243.214.468,00,- dan Belanja Modal Rp 125.510.832.999,00,-. Pada perubahan APBD-P 2025 terakhir menjadi sebesar Rp 359.894.299.689,00,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 188.504.230.748,00,- dan Belanja Modal sebesar Rp 171.390.068.941,00,-

2.3.1 Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 359.894.299.689,00 - dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 188.504.230.748,00,- dan Belanja modal sebesar Rp 171.390.068.941,00,-

Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Persentase
BELANJA OPERASI	Rp 188.504.230.748,00	52,38%
Belanja Pegawai	Rp 32.689.803.681,00	9,08%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 155.814.427.067,00	43,29%
BELANJA MODAL	Rp 171.390.068.941,00	47,62%
Belanja Modal Tanah	Rp 3.171.635.700,00	0,88%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.770.135.467,00	0,49%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 74.425.740.567,00	20,68%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 91.972.557.207,00	25,56%
Belanja Modal Aset dan Lainnya	Rp 50.000.000,00	0,01%
Jumlah Belanja	Rp 359.894.299.689,00	100,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2025

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Modal dan Operasi per Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase (%)	Keterangan
1	2		3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	Rp 17.337.103.381,00	4,82%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (1 Program, 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase (%)	Keterangan
1	2		3	4	5
	Sumber Daya Air	Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	Rp 5.635.220.932,00	1,57%	Kegiatan, 13 Sub Kegiatan)
2	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Rp 118.943.431.471,25	33,05%	Program Penyelenggaraan Jalan (1 Program, 1 Kegiatan, 12 Sub Kegiatan)
3	Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	Rp 100.413.781.770,00	27,90%	Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (3 Program, 3 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan)
4	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	Rp 2.322.968.464,00	0,65%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (1 Program, 4 Kegiatan, 10 Sub Kegiatan)
5	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 46.919.502.017,22	13,04%	Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (3 Program, 5 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan)
6	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	Rp 1.047.460.500,00	0,29%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (1 Program, 1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan)
		Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak,	Rp 4.644.367.800,00	1,29%	Program Perkembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase (%)	Keterangan
1	2		3	4	5
		perkotaan dan perdesaan			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Perkembangan Sistem Drainase (3 Program, 3 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Rp 52.482.390.685,53	14,58%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (2 Program, 11 Kegiatan, 40 Sub Kegiatan)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 10.148.072.668,00	2,82%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (1 Program, 8 Kegiatan, 14 Sub Kegiatan)
Jumlah			Rp 359.894.299.689,00	100,00%	15 Program, 30 Kegiatan, 98 sub kegiatan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2025

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2025, digunakan instrument-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian Pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada Masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan Masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses Pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selalu berberkah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

3. Aplikasi Sipjaki Adalah sebuah platform digital terintegrasi yang di kembangkan oleh Pemerintahan Pusat Kementerian PUPR untuk seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia guna mengelola data dan informasi di sektor jasa konstruksi, memantau Indikator Kinerja Kewenangan (IKK) serta memperkuat jaringan bisnis pelaku konstruksi

Gambar 2.3 Aplikasi SIPJAKI



Sumber: <https://sipjaki.pu.go.id>

4. Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah aplikasi yang platform digital resmi dari Kemendagri yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan dan Pembangunan pemerintah daerah secara elektronik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.

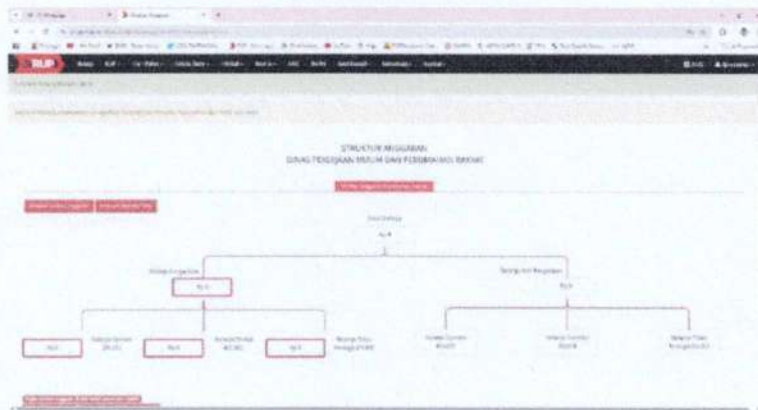
Gambar 2.4 Aplikasi SIPD



Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd>

5. Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) adalah platform web dari LKPP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa pemerintah secara transparan dan terstandar, memudahkan instansi mengelola RUP serta penyedia dan masyarakat mengakses informasi pengadaan untuk transparansi dan pengawasan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan informasi publik dalam proses pengadaan pemerintah.

Gambar 2.5 Aplikasi SiRUP



Sumber: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index>

6. Aplikasi E-SPM Adalah aplikasi Sistem Pelaporan Elektronik Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri untuk memantau dan mengevaluasi capaian pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah secara online. Aplikasi SPM sendiri digunakan pada bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat.

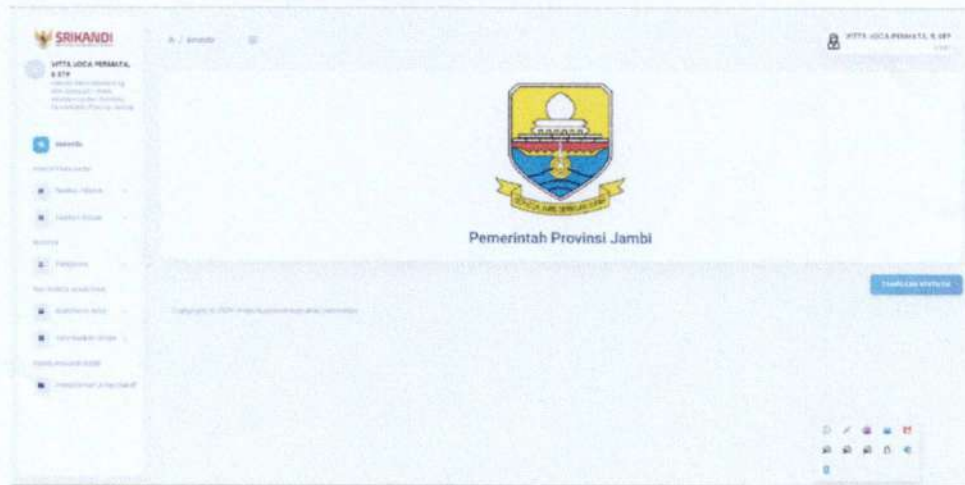
Gambar 2.6 Aplikasi E-SPM



Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home>

7. Aplikasi Srikandi Adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi merupakan sebuah aplikasi pemerintah Indonesia untuk mengelola arsip dinamis secara elektronik, mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan mengintegrasikan seluruh instansi pemerintah

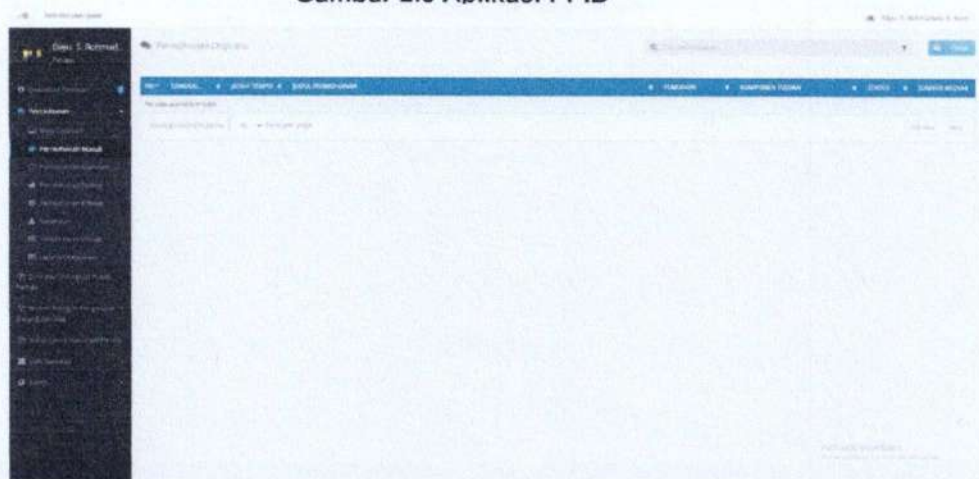
Gambar 2.7 Aplikasi Srikandi



Sumber: <https://srikandi.arsip.go.id/beranda>

8. Aplikasi PPID Adalah platform digital (web/mobile) yang memfasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

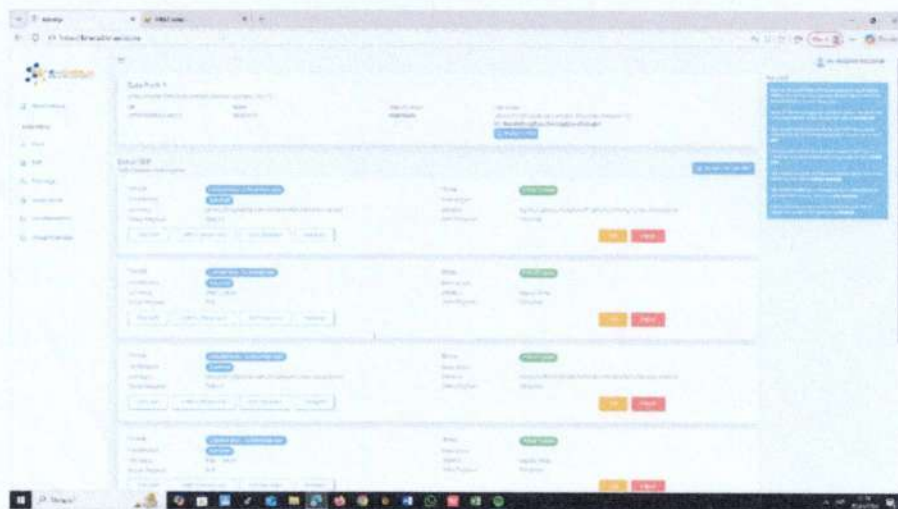
Gambar 2.8 Aplikasi PPID



Sumber: ppid.jambiprov.go.id/login

9. Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi sistem digital berbasis web dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terukur, transparan, dan akuntabel, meliputi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pemantauan aktivitas harian, penilaian, hingga integrasi dengan data kepegawaian lainnya seperti kenaikan pangkat dan tunjangan, sehingga mendukung pengambilan Keputusan berbasis data untuk pelayanan publik.

Gambar 2.9 Aplikasi E-Kinerja



Sumber: <https://kinerja.bkn.go.id/skp>

2.4.2 Sistem Informasi (Aplikasi Internal yang diciptakan oleh OPD)

Penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2025 telah menerapkan aplikasi berbasis online sampai kepada proses Monitoring dan Evaluasi kegiatan, Adapun aplikasi internal yang diciptakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi meliputi:

1. E-Monev adalah aplikasi yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu pada seksi monitoring dan evaluasi sebagai Upaya untuk mengukur capaian realisasi fisik dan keuangan pada setiap bidang yang dilakukan setiap bulan.

Gambar 2.10 Aplikasi E-Monev



Sumber: <https://e-monevpupr.jambiprov.go.id/app.html>

2. Awasi adalah aplikasi yang digunakan untuk mengawasi pekerjaan atau kegiatan fisik di lapangan berbasis online meliputi pengisian progress pekerjaan, laporan kegiatan mingguan, kendala yang terjadi di lapangan, perkembangan pekerjaan fisik meliputi (target, realisasi dan deviasi) dan dokumentasi.

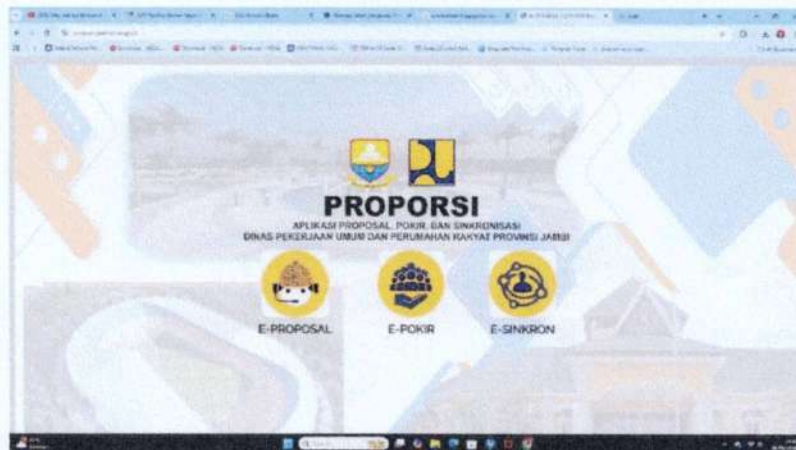
Gambar 2.11 Aplikasi Awasi



Sumber: <https://awasi.e-monevpupr.jambiprov.go.id/login>

3. E-Proporsi Adalah aplikasi yang mengolah proposal, pokok pikiran, sinkronisasi progam dan kegiatan dan aplikasi yang berguna untuk sistem manajemen informasi yang bertujuan untuk mengolah data usulan untuk kegiatan fisik yang merupakan kewenangan Provinsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

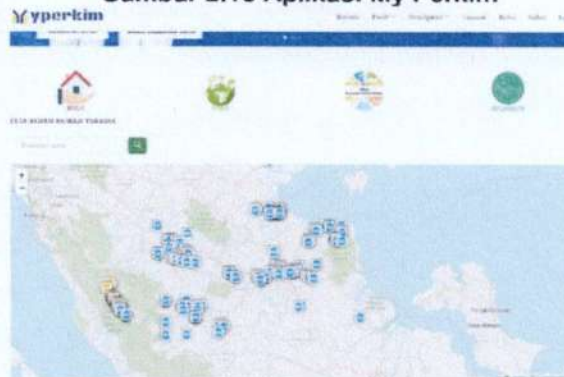
Gambar 2.12 Aplikasi E-Proporsi



Sumber: program.jambiprov.go.id

4. My Perkim adalah aplikasi yang diciptakan oleh bidang Perumahan yang bertujuan untuk mengolah data-data Rumah Tidak Layak Huni yang sudah tertangani dan yang belum tertangani dari tahun 2022 hingga 2025.

Gambar 2.13 Aplikasi My Perkim



Sumber: <https://myperkim.jambiprov.go.id/>

Bab 3 berisi :

- 3.1 Capaian Kinerja PK Tahun 2025 & PK Perubahan Tahun 2025
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Perubahan
- 3.4 Capaian Program Penunjang Kinerja
- 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
- 3.7 Tindak Lanjut atas LHE AKIP Tahun 2024 Tindak Lanjut Tahun 2025
- 3.8 Realisasi Anggaran

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas PUPR Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan

posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	persen	28,27	21,88	77,40	Hijau Muda
		Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	65,78	66,83	101,60	Hijau Tua
2	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	83,87%	69,385%	82,729	Hijau Muda
3	Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	Unit	7	9	128,57	Hijau Tua
4	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	Persen	80	75	93,75	Hijau Tua
5	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Hektar	10,41	1,05	10,09	Merah
6	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	85	82,16	96,66	Hijau Tua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	83,05	83,97	101,11	Hijau Tua
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP	BB (76 Predikat)	77 Predikat	101,32	Hijau Tua
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	91,90	92,05	100,16	Hijau Tua

Sumber Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2025

Dinas PUPR Provinsi Jambi pada perjanjian kinerja awal eselon II Tahun Anggaran 2025 memiliki 10 (tujuh) indikator sasaran kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Pada tahun 2025, tujuh dari sepuluh indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau persentase capaian melebihi 100%, dari total indikator dengan persentase capaian rata-rata sebesar 93,62 dengan kategori capaian *tinggi* atau dapat dikategorikan dengan warna **hijau tua**.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas PUPR TA 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	N/A	Merah
2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	Nilai	70,01	81,40	116,27%	Hijau Tua
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Persen	91,90%	92,05%	100,16%	Hijau Tua
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	75	77	102,67%	Hijau Tua

Sumber Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.3, terlihat bahwa capaian sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu sebagai upaya meningkatkan layanan infrastruktur pekerjaan umum yang terdiri dari beberapa bidang fisik yaitu Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi belum memiliki realisasi dan target yang spesifik dikarenakan belum memiliki metode perhitungan target yang sesuai.

Realisasi dari sasaran strategis Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel memiliki tiga indikator yaitu yang pertama Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD memiliki realisasi 81,40 dengan persentase capaian 116,27 persen, selanjutnya untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki realisasi 92,05% dengan persentase capaian 100,16% dan yang terakhir Nilai SAKIP Perangkat Daerah memiliki realisasi sebesar 77

dengan persentase capaian 102,67%. Ketiga indikator tersebut memiliki persentase capaian lebih dari 100% atau telah melebihi target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki dua (2) indikator, yaitu Persentase Pengurangan Daya Rusak Air dan Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa.
- Normalisasi/ Restorasi Sungai.
- Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi.
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi.
- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.
- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai.
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku.
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa.
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa.
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

Perbandingan antara realisasi indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air dan indikator persentase kondisi sistem irigasi kewenangan Provinsi dengan target tahun 2025, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dan perbandingan pada target renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.2.1, 3.2.2, dan 3.2.3.

Tabel 3.2.1 Capaian Realisasi Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	28,27%	21,88%	77,40%
		Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	65,78%	66,83%	101,60%

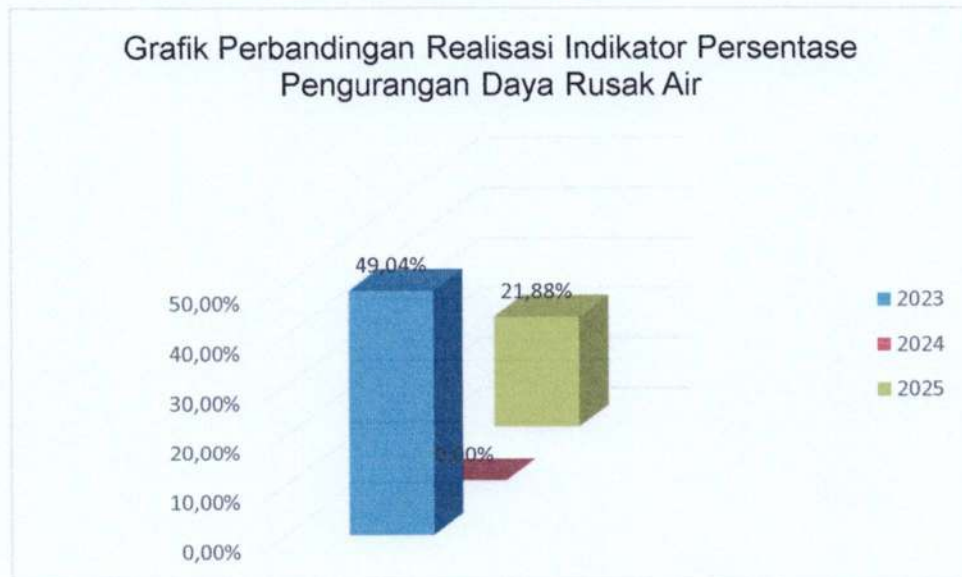
Sumber: Bidang Sumber Daya Air, 2025

Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air dan Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	49,04%	0,00%	28,27%	21,88%	77,40%
2.	Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	62,80%	62,49%	65,78%	66,83%	101,60%

Sumber: Bidang Sumber Daya Air, 2025

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air Tahun 2023-2025



Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2023-2025



Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air dan Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2023-2025

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	0	49,04%	0,00%	21,88%	17,48%	125,17%
2.	Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	81,04%	62,80%	62,49%	66,83%	66,35%	100,72%

Sumber: Bidang Sumber Daya Air, 2025

Capaian kinerja sasaran 1, diukur dengan dua (2) indikator kinerja yaitu Persentase Pengurangan Daya Rusak Air, dan Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator kinerja yang pertama yaitu persentase pengurangan daya rusak air mencapai realisasi tahun 2025 sebesar 21,88% dengan rincian capaian pekerjaan fisik pada tahun 2025 yaitu telah melakukan normalisasi sungai sepanjang 14.050 meter dari target Sungai sebesar 7.000 meter, telah membangun bangunan perkuatan tebing sepanjang 248 meter dari target 1.000 meter dan telah membangun 1 titik sumur dari target 15 titik. Indikator ini telah memberikan persentase capaian sebesar 77,40 % dengan kategori capaian **Tinggi** atau dapat dikategorikan dengan warna **hijau muda**.

Indikator kedua yaitu Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi mencapai realisasi tahun 2025 sebesar 66,83% dengan rincian capaian pekerjaan fisik pada tahun 2025 yaitu berdasarkan kinerja dari aplikasi e-paksi yaitu telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa sepanjang 100,675 Km yang dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Jambi dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI). Indikator ini telah memberikan persentase capaian sebesar 100,72% dengan kategori capaian **Sangat Baik** atau dapat dikategorikan dengan warna **hijau tua**.

Berdasarkan tabel 3.2.2 dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Indikator pertama yaitu Persentase Pengurangan

Daya Rusak Air pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 49,04% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan realisasi menjadi 0% karena adanya refocusing anggaran. Selanjutnya pada tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi menjadi 21,88%. Untuk indikator kedua yaitu Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 62,80 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar 0,31% menjadi 62,49. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi sebesar 4,34% menjadi 66,83%.

Berdasarkan tabel 3.2.3 dapat dilihat perbandingan realisasi tahun 2023 hingga tahun 2025. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa realisasi mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2025. Adapun capaian realisasi tahun 2025 terhadap target renstra tahun 2026 pada indikator persentase pengurangan daya rusak air mencapai realisasi sebesar 125,17% dan pada indikator persentase kondisi sistem irigasi kewenangan Provinsi mencapai realisasi sebesar 100,72%.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat pada sasaran ini adalah sebagai berikut

- Faktor pendorong indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air
 - Sungai yang dinormalisasi/ direstorasi.
 - Bangunan Perkuatan Tebing yang telah dibangun
 - Sumur air tanah yang telah dibangun
- Faktor pendorong indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
 - Percepatan Pelaksanaan tender pekerjaan
 - Ketersediaan anggaran yang cukup untuk meningkatkan irigasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- Faktor penghambat indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
 - Terjadinya Perubahan Anggaran
 - Frekuensi hujan yang tinggi di akhir tahun
- Faktor penghambat indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
 - Terlambatnya pelaksanaan tender pekerjaan dikarenakan turunnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
 - Kurangnya ketersediaan anggaran dalam meningkatkan irigasi sesuai dengan target yang telah ditentukan

- Upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pada indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air yaitu
 - Menggunakan Sumber Daya yang tersedia secara maksimal.
 - Memaksimalkan waktu agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.
- Upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pada indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
 - Skala prioritas dan kolaborasi lintas pemerintah daerah dan pusat
 - Optimalisasi Kegiatan sehingga target persentase kondisi baik dapat tercapai sesuai RPJMD dan Renstra Dinas PUPR T.A 2026.

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi

Meningkatnya kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap dengan indikator kinerjanya yakni persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap. Sasaran ini dicapai melalui program penyelenggaraan Jalan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Pengawasan penyelenggaraan jalan kewenangan Provinsi.
- Pemeliharaan rutin jembatan.
- Rekonstruksi jalan.
- Pembangunan jembatan.
- Pemeliharaan rutin jalan.
- Pemeliharaan berkala jalan.
- Pelebaran jalan menuju standar.
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- Survey kondisi jalan/ jembatan.
- Pengelolaan leger jalan.

Perbandingan antara realisasi indikator Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap dengan target tahun 2025, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dan perbandingan pada target renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel **3.2.4**, **3.2.5**, dan **3.2.6**.

Tabel 3.2.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	83,87%	69,385%	82,729%

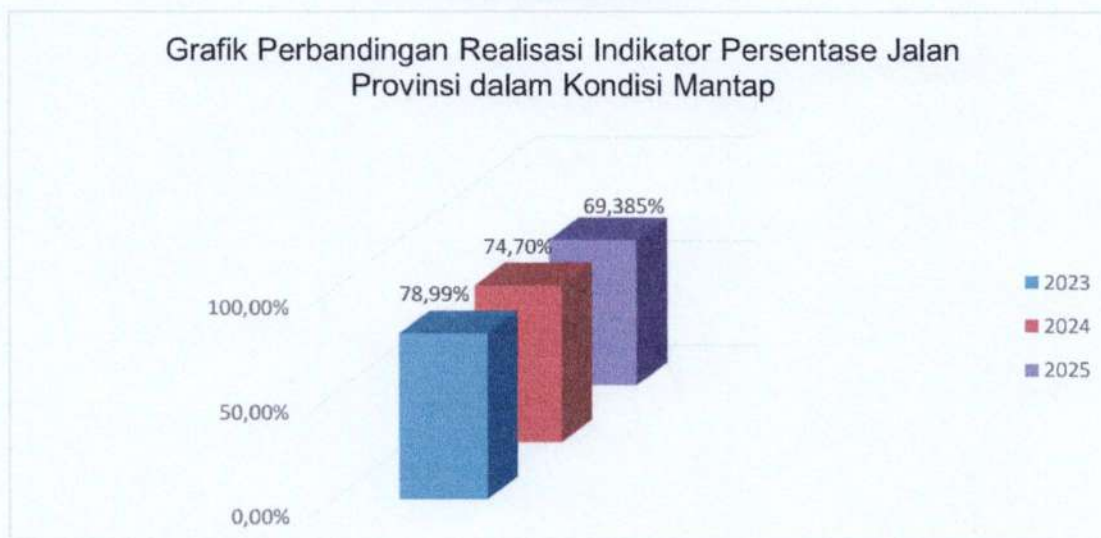
Sumber: Bidang Bina Marga, 2025

Tabel 3.2.5 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	78,99%	74,70%	83,87%	69,385%	82,73%

Sumber: Bidang Bina Marga, 2025

Gambar 3.3 Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya kualitas jalan Provinsi Tahun 2023-2025



Tabel 3.2.6 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	76,98%	78,99%	74,70%	69,385%	85,25%	81,39%

Sumber: Bidang Bina Marga, 2025

Capaian kinerja sasaran 2, diukur dengan satu (1) indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas jalan Provinsi dengan indikator kinerja persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan realisasi tahun 2025 sebesar 69,385% dengan capaian fisik tahun 2025 yaitu telah melakukan penanganan jalan mantap sepanjang 14,10 Km dari panjang total jalan mantap sebesar 821,372 Km dari total jalan kewenangan jalan Provinsi Jambi yaitu sebesar 1.183,787 Km. Berdasarkan capaian fisik belum mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 82,243% dengan capaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 69,385%. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 82,729% dengan kategori capaian **Tinggi** atau dapat dikategorikan dengan warna **hijau muda**.

Berdasarkan tabel 3.2.5 dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Adapun capaian tahun 2023 yaitu sebesar 78,99% lalu pada tahun 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar 4,29% menjadi sebesar 74,70% dan mengalami penurunan realisasi sebesar 5,315 % menjadi 69,385%.

Berdasarkan tabel 3.2.6 dapat dilihat perbandingan realisasi tahun 2023 hingga tahun 2025. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa realisasi mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2025. Adapun capaian realisasi tahun 2025 terhadap target renstra tahun 2026 yaitu sebesar 81,39 persen.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa target sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi mencapai realisasi 69,385% dengan persentase capaian 82,729%. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Faktor Pendorong dalam mencapai hasil tersebut Adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan tender pekerjaan.
2. Peran serta masyarakat sebagai pengguna jalan terhadap beban kendaraan yang melintas (tidak over dimensi-over loading).
3. Kerjasama dengan instansi terkait (Stacholder) terhadap rambu-rambu jalan dan penegakan kebijakan dalam penggunaan jalan.
4. Pekerja yang memiliki standar kompetensi (keahlian) dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kemantapan jalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah sebagai berikut:

1. Terlambatnya pelaksanaan tender pekerjaan dikarenakan turunnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
2. Masyarakat selaku pengguna jalan tidak peduli terhadap lalu lintas harian (LHR) dan tonasi kendaraan (over dimens-over loading)
3. Belum optimalnya kerjasama dengan instansi terkait (Stacholder) terhadap rambu jalan dan selaku penegak kebijakan dalam penggunaan jalan
4. Kurangnya pekerja yang memiliki standar kompetensi (keahlian) dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Kurangnya ketersediaan anggaran dalam meningkatkan kemantapan jalan sesuai dengan target yang telah ditentukan

Hambatan utama pada sasaran meningkatnya kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap yaitu belum semua jalan kewenangan Provinsi dapat ditangani karena keterbatasan anggaran dengan upaya nyata sebagai berikut:

1. Penanganan Jalan dilakukan dengan skala prioritas, berdasarkan tingkat kerusakan.
2. Mengupayakan sumber dana yang lain diluar APBD Provinsi Jambi.
3. Melakukan pembinaan dan pembekalan keahlian terhadap pekerja pelaksana pekerjaan.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai target pekerjaan.

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi

Sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Peningkatan dengan indikator kinerjanya Jumlah Bangunan Gedung Strategis yang Berfungsi dengan Baik operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/sub kegiatan :

1. Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Normalisasi/ Restorasi Sungai.

2. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

3. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Perbandingan antara realisasi indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik dengan target tahun 2025, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dan perbandingan pada target renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel **3.2.7**, **3.2.8**, dan **3.2.9**.

Tabel 3.2.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	7 Unit	9 Unit	128,57%

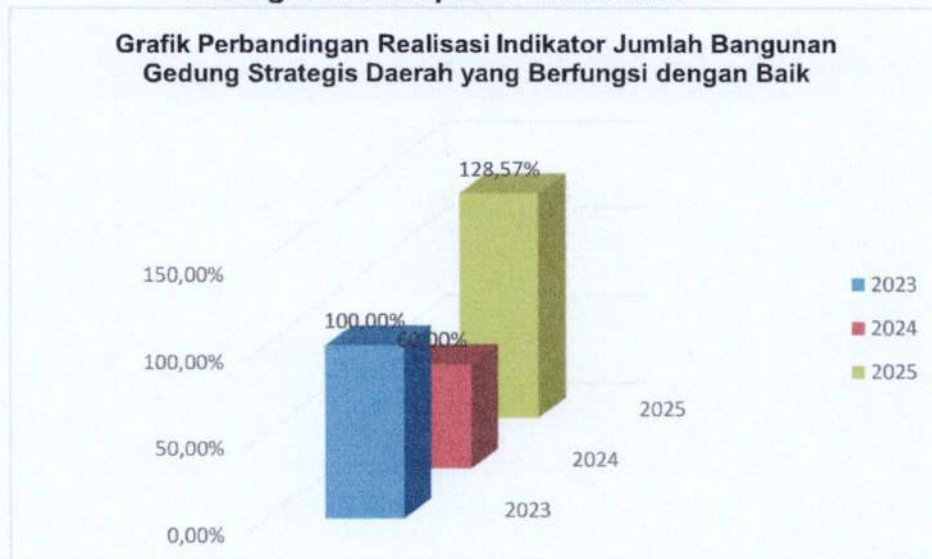
Sumber: Bidang Cipta Karya, 2025

Tabel 3.2.8 Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang Berfungsi dengan Baik

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	100%	60,00%	7 Unit	9 Unit	128,57%

Sumber: Bidang Cipta Karya, 2025

Gambar 3.3 Grafik Realisasi Sasaran Meningkatkan Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah pada Tahun 2025



Tabel 3.2.9 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang Berfungsi dengan Baik

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	0	100,00%	60,00%	128,57%	42,11%	305,32%

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2025

Capaian kinerja sasaran 3, diukur dengan satu (1) indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah bangunan Gedung strategis daerah yang berfungsi dengan baik dengan realisasi tahun 2025 sebesar 9 Unit dari target sebesar 7 Unit dengan persentase capaian sebesar 128,57% dengan rincian capaian fisik tahun 2025 yaitu penataan Kawasan dan interior Islamic Center, Pembangunan atap, mekanikal & elektrikal Gedung Tribun Barat Stadion Jambi Swarna Bhumi, Rehab tempat wudhu dan wc Masjid Agung Alfalah, Rehab Bangunan Gedung LVRI, Rehab Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi, Renovasi ruang dan interior Gedung VIP Bandara Sulthan Thaha Jambi, Rehab Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Rehabilitasi/Renov Gedung Asrama Mahasiswa Jambi di Yogyakarta dan Bandung, dan Rehab Anjungan Jambi TMII Jakarta. Berdasarkan capaian fisik sudah mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 7 unit dengan capaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 128,57%. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 128,57% dengan kategori capaian **Sangat Baik** atau dapat dikategorikan dengan warna **hijau tua**.

Berdasarkan tabel 3.2.8 dapat dilihat perbandingan persentase capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan capaian kinerja 45% dari target kinerja sebesar 25% lalu pada tahun 2024 mengalami penurunan persentase capaian sebesar 40% menjadi sebesar 60% dengan realisasi kinerja 3 unit dari target kinerja

5 unit bangunan dan gedung dan mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 68,57% dengan realisasi 9 unit bangunan Gedung dari target 7 unit bangunan gedung menjadi 128,57%.

Berdasarkan tabel 3.2.9 dapat dilihat perbandingan realisasi tahun 2023 hingga tahun 2025. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa realisasi mengalami penurunan tahun 2024 dan mengalami kenaikan persentase capaian pada tahun 2025. Adapun persentase capaian realisasi tahun 2025 terhadap target renstra tahun 2026 yaitu sebesar 305,32 persen.

Berikut Faktor pendorong pada sasaran meningkatnya fungsi bangunan Gedung strategis daerah Provinsi yaitu;

1. Perencanaan tata ruang yang baik yaitu adanya kesesuaian antara fungsi bangunan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi.
2. Ketersediaan anggaran dan pembiayaan yaitu dukungan dana dari APBD maupun kerja sama dengan pihak lain untuk pemeliharaan dan peningkatan fungsi.
3. Kebijakan dan regulasi Pemerintah Daerah, peraturan daerah yang mengatur pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan bangunan strategis.

Faktor penghambat dan hambatan pada sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi yaitu;

1. Kualitas perencanaan teknis yang belum optimal, yaitu perencanaan tidak sepenuhnya mengacu pada standar teknis bangunan Gedung negara
2. Keterbatasan SDM teknis yaitu jumlah tenaga ahli bangunan dan kompetensi pengelola Gedung belum merata.
3. Terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu Gedung tetap digunakan untuk pelayanan public sehingga perbaikan tidak optimal.
4. Kurangnya kesadaran pengguna Gedung terhadap pemeliharaan yaitu penguasaan tidak sesuai SOP pemanfaatan Gedung.

Upaya nyata yang telah dilakukan Dinas PUPR dalam mengatasi hambatan pada sasaran Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi diatas yaitu;

1. Optimalisasi fungsi pelayanan publik, Gedung strategis (kantor Pemerintahan, rumah sakit daerah, balai pertemuan) harus benar-benar mendukung

pelayanan Masyarakat secara cepat, transparan dan efisien.

2. Renovasi dan revitalisasi Gedung lama agar sesuai standar modern
3. Monitoring dan evaluasi berkala yaitu menggunakan indikator kinerja (jumlah layanan, kepuasan Masyarakat dan efisiensi biaya.
4. Audit fungsi dan kebutuhan yaitu menilai apakah Gedung masih relevan dengan kebutuhan Masyarakat, lalu menyesuaikan.

3.2.4 Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah

Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah dengan indikator persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang. Sasaran ini dicapai melalui program penyelenggaraan penataan ruang yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
Sub kegiatannya sebagai berikut;
 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang.
Sub kegiatannya sebagai berikut;
 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang
 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

Perbandingan antara realisasi indikator Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dengan target tahun 2025, perbandingan dengan

realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dan perbandingan pada target renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.2.7, 3.2.8, dan 3.2.9.

Tabel 3.2.10 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	80,00%	75,00%	93,75%

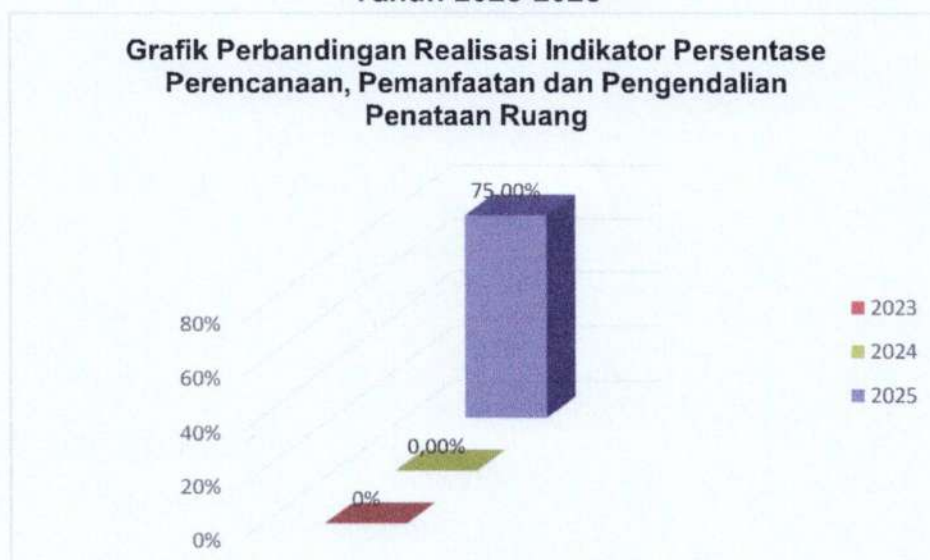
Sumber: Bidang Bina Program dan Tata Ruang, 2025

Tabel 3.2.11 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	0%	0,00%	80,00%	75,00%	93,75%

Sumber: Bidang Bina Program dan Tata Ruang, 2025

Gambar 3.5 Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah Tahun 2023-2025



Tabel 3.2.12 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	60,00%	125,00%

Sumber: Bidang Bina Program dan Tata Ruang, 2025

Capaian kinerja sasaran 4 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang dengan realisasi sebesar 75% belum mencapai target pada perjanjian kinerja 2025 yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 93,75%. Adapun capaian fisik dari sasaran penataan ruang yaitu ada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang terdiri dari Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi telah mengumpulkan 9 dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 93,75% dengan kategori capaian **Sangat Baik atau dapat dikategorikan dengan warna hijau tua**.

Berdasarkan tabel 3.2.7 dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Adapun capaian tahun 2023 yaitu sebesar 0% lalu pada tahun 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar 0% menjadi sebesar 75%. Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah baru ditambahkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga belum memiliki realisasi pada tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan tabel 3.2.8 dapat dilihat sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah dengan indikator Persentase perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang belum memiliki target kinerja pada dokumen perjanjian kinerja dan renstra 2021-2026 sehingga belum memiliki target kinerja dan

realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024. Adapun capaian realisasi tahun 2025 terhadap target renstra tahun 2026 pada dokumen Renstra 2025-2029 yaitu sebesar 125 %.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa target sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah mencapai realisasi 75% dengan persentase capaian 125%. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Faktor pendorong dari sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah didukung oleh adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengatur pemanfaatan ruang secara jelas. Selain itu, kemajuan teknologi seperti penggunaan Sistem Informasi Geografis membantu perencanaan ruang menjadi lebih akurat. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat juga mendorong perlunya pengaturan ruang yang tertib. Faktor lainnya adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang memerlukan keterpaduan ruang, serta dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang.

Faktor penghambat dari sasaran ini yaitu sering terhambat oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang serta rendahnya kepatuhan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Keterbatasan data dan teknologi, kurangnya kualitas dan jumlah sumber daya manusia, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi juga menjadi kendala. Selain itu, konflik kepentingan pemanfaatan lahan, tekanan ekonomi dan urbanisasi yang tidak terkendali, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang turut menghambat terwujudnya penataan ruang wilayah yang efektif dan berkelanjutan.

Hambatan pada sasaran ini yaitu ketidaksinkronan regulasi di Dinas PUPR, lemahnya koordinasi, keterbatasan data dan SDM, serta rendahnya kepatuhan. Adapun upaya nyata yang telah dilakukan yaitu melakukan penguatan regulasi, digitalisasi data, peningkatan kapasitas, integrasi program pembangunan, serta melakukan pengawasan berbasis teknologi dan penegakan hukum yang tegas dan meningkatkan efektivitas penataan ruang sehingga Pembangunan lebih berkelanjutan, adil dan tertib.

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan indikator Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh. Sasaran ini dicapai melalui program pengembangan perumahan, program Kawasan permukiman, dan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi.

2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

4. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

5. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

Perbandingan antara realisasi indikator Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan target tahun 2025, perbandingan dengan realisasi

tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dan perbandingan pada target renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.2.13, 3.2.14, dan 3.2.15.

Tabel 3.2.13 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	10,41 Hektar	1,05 Ha	10,086%

Sumber: Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 3.2.14 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	0 Ha	1,25 Ha	10,41 Ha	1,05 Ha	10,09%

Sumber: Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Gambar 3.6 Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2023-2025



Tabel 3.2.15 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Pengurangan Luas Kawasan Permukiman

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	0 Ha	0 Ha	1,25 Ha	1,05 Ha	18,01 Ha	5,83%

Sumber: Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Capaian kinerja sasaran 5 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan satu indikator kinerja yaitu Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan realisasi sebesar 1,05 Ha belum mencapai target pada perjanjian kinerja 2025 yaitu sebesar 10,41 Ha dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 10,09%. Adapun capaian fisik dari sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman yaitu pengurangan luas Kawasan permukiman kumuh dengan penanganan jalan lingkungan 100 m dan drainase 171 m di RT 9 RW 4 Pasar Bangko, Kabupaten Merangin. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 10,09% dengan kategori capaian **Sangat Rendah** atau dapat dikategorikan dengan warna **merah**.

Berdasarkan tabel 3.2.14 dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Adapun capaian tahun 2023 yaitu sebesar 0 Ha lalu pada tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 1,25 Ha menjadi sebesar 1,25 Ha. Pada tahun 2025 sasaran ini kembali mengalami penurunan realisasi sebesar 0,20 Ha menjadi 1,05 Ha.

Berdasarkan tabel 3.2.15 dapat dilihat sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan indikator Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2025 memiliki capaian sebesar 1,05 Ha apabila dibandingkan dengan target Renstra 2026 pada dokumen Renstra 2025-2026 mencapai realisasi sebesar 5,83%.

Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Faktor pendorong dari sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman adalah ketersediaan anggaran melalui DPA APBD TA 2025, kesiapan

dokumen perencanaan yang komprehensif serta sinergi kebijakan dan dukungan administrasi.

Faktor penghambat dari sasaran ini yaitu belum tuntasnya proses administrasi dan perizinan, tumpang tindih waktu antara perencanaan dan pelaksanaan fisik serta keterbatasan anggaran yang menyulitkan penentuan prioritas.

Hambatan pada sasaran ini yaitu pertumbuhan penduduk dan urbanisasi cepat, keterbatasan lahan perkotaan dan pendanaan terbatas. Adapun upaya nyata yang telah dilakukan yaitu melakukan revitalisasi dan peremajaan Kawasan yaitu Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk relokasi warga dari kawasan kumuh dan melakukan peningkatan akses layanan dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah.

3.2.6 Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak memiliki dua indikator kinerja yaitu Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak Perkotaan dan Perdesaan. Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

2. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Perbandingan antara realisasi persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Layak, perkotaan dan perdesaan dan persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, Perkotaan dan Perdesaan dengan target tahun 2025, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dan perbandingan pada target renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel **3.2.16**, **3.2.17**, dan **3.2.18**.

Tabel 3.2.16 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85,00%	82,16%	96,66%
		Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	83,05%	83,97%	101,11%

Sumber: Bidang Cipta Karya, 2025

Tabel 3.2.17 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06%	82,16%	85,00%	82,16%	96,66%
	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	83,04%	83,97%	83,05%	83,97%	101,11%

Sumber: Bidang Cipta Karya, 2025

Gambar 3.7 Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan



Gambar 3.8 Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan



Tabel 3.2.18 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dan Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06%	80,02%	82,16%	82,16%	40,00%	205,40%
	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	0,00%	83,04%	83,97%	83,97%	70,00%	119,96%

Sumber: Bidang Cipta Karya, 2025

Capaian kinerja sasaran 6 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan dan indikator kedua yaitu Persentase rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan. Secara umum kinerja sasaran strategis Meningkatnya akses air minum dan sanitasi Layak dengan indikator kinerja yaitu Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan mencapai realisasi sebesar 82,16 % belum mencapai target tahun 2025 yaitu sebesar 85% dengan persentase capaian 96,66%. Hasil capaian ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Jambi dalam Angka pada tahun 2024 dikarenakan data BPS pada tahun 2025 baru keluar pada bulan Juni 2026 sehingga masih menggunakan capaian tahun 2024. Selanjutnya untuk indikator persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, Perkotaan dan Perdesaan mencapai realisasi sebesar 83,97% sudah melewati target pada Renstra yaitu sebesar

83,05% dengan persentase capaian sebesar 101,11%. Realisasi ini juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 96,66% untuk indikator Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan dengan kategori capaian **Sangat Baik atau dapat dikategorikan dengan warna hijau tua**. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan mencapai persentase realisasi sebesar 101,11% dengan kategori capaian **Sangat baik atau dapat dikategorikan dengan warna hijau tua**.

Berdasarkan tabel 3.2.17 dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Adapun capaian tahun 2023 untuk indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan yaitu sebesar 78,06% lalu pada tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 4,1 % menjadi sebesar 82,16%. Pada tahun 2025 sasaran ini masih sama yaitu 82,16% karena data BPS terhadap Air Minum Layak baru keluar pada bulan Juni 2026. Sedangkan untuk indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan mencapai realisasi sebesar 83,04% dan mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,93% sehingga menjadi 83,97%. Pada tahun 2025 realisasi masih sama karena data BPS terhadap Sanitasi Layak baru keluar bulan Juni 2026.

Berdasarkan tabel 3.2.17 dapat dilihat sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan memiliki realisasi sebesar 82,16 pada tahun 2025 dan memiliki capaian persentase capaian tahun 2025 terhadap target renstra 2026 sebesar 205,40%. Untuk indikator kedua yaitu Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan pada tahun 2025 memiliki capaian sebesar 83,97% apabila dibandingkan dengan target Renstra 2026 pada dokumen Renstra 2025-2026 mencapai realisasi sebesar 119,96%.

Berikut faktor pendorong dan penghambat pada sasaran Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, Perkotaan dan Perdesaan dan indikator persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap

sanitasi layak, Perkotaan dan Perdesaan;

Faktor pendorong meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak di Perkotaan maupun Perdesaan, adalah kombinasi kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat, serta dukungan infrastruktur.

Faktor penghambat peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Perkotaan dan Perdesaan adalah keterbatasan infrastruktur, ketimpangan wilayah (perkotaan vs perdesaan), rendahnya kesadaran masyarakat, serta masalah sosial-ekonomi. Tantangan ini membuat capaian indikator rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi layak masih belum merata.

3.2.7 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 (dua) indikator predikat peringkat AKIP Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja program dan kegiatannya dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu bidang Sekretariat, Bina Program dan Tata Ruang, UPTD Workshop dan Peralatan (UPTD WDP) dan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

Sasaran ini dicapai melalui program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan,, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Perbandingan antara realisasi indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2025, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dan perbandingan pada target renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.2.19, 3.2.20, dan 3.2.21.

Tabel 3.2.19 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (76 Predikat)	BB (77 Predikat)	101,32%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,90%	92,05%	100,16%

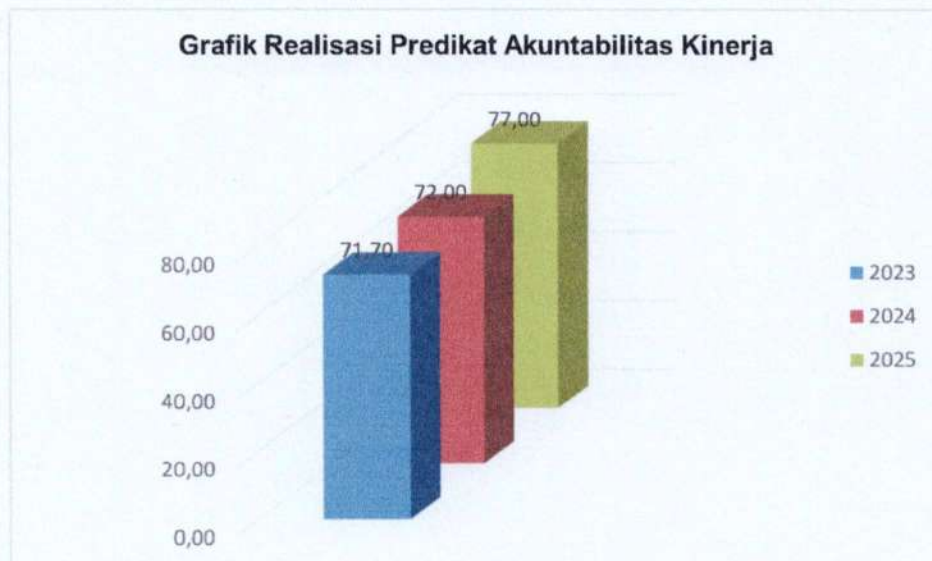
Sumber: Bidang Sekretariat, Bina Program dan Tata Ruang, UPTD WDP dan UPTD LBK, 2025

Tabel 3.2.20 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

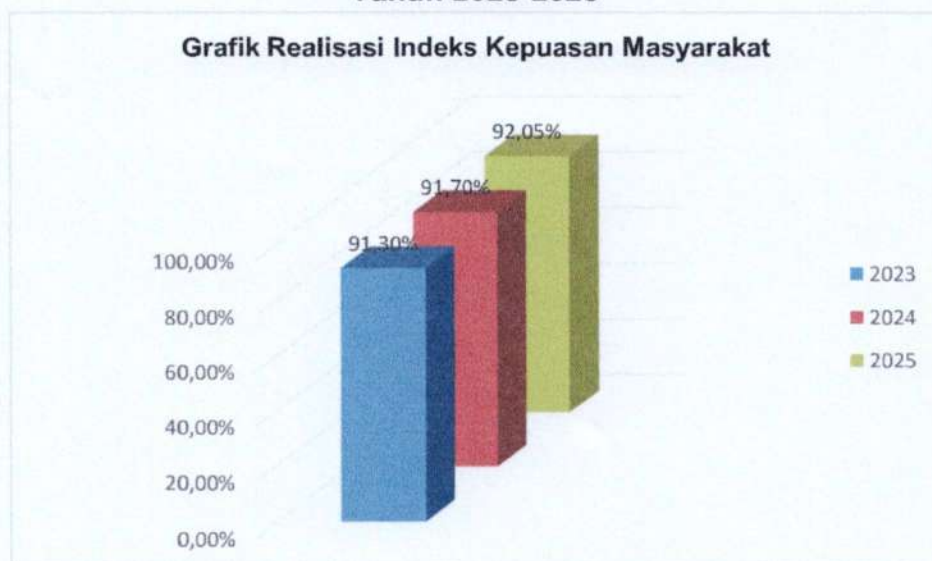
No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (71,70 Predikat)	BB (72 Predikat)	BB (76 Predikat)	BB (77 Predikat)	101,32%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,30%	91,70%	91,90%	92,05%	100,16%

Sumber: Bidang Sekretariat, Bina Program dan Tata Ruang, UPTD WDP dan UPTD LBK, 2025

Gambar 3.9 Grafik Realisasi Predikat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023-2025



Gambar 3.10 Grafik Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023-2025



Tabel 3.2.21 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	0,00%	BB (71,70 Predikat)	BB (72 Predikat)	BB (77 Predikat)	BB (76 Predikat)	101,32%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,00%	91,30%	91,70%	92,05%	92,10%	99,95%

Sumber: Bidang Sekretariat, Bina Program dan Tata Ruang, UPTD WDP dan UPTD LBK, 2025

Capaian kinerja sasaran 7, diukur dengan satu (2) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator pertama yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja mendapatkan predikat AKIP BB (77 Predikat) dengan persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,32% realisasi tersebut didapatkan dari hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Jambi pada dokumen 2024 dan dokumen 2025 pada bulan April 2025 dan hasilnya keluar pada LHE AKIP pada bulan Agustus 2025. Hasil Penilaian ini dilakukan pada empat komponen penilaian kinerja yang terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot 24,00, pengukuran kinerja dengan bobot 22,50, pelaporan kinerja dengan bobot 12,00 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 18,50. Berdasarkan empat aspek penilaian tersebut Dinas PUPR memperoleh nilai 77 atau mendapatkan predikat BB dengan interpretasi sangat baik.

Untuk indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan realisasi sebesar 92,05% dengan persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100,16% berdasarkan penilaian pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat (SKM) Tahap 2 yang dilaksanakan pada Juli-Desember 2025 dengan sembilan uraian penilaian yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana.

Berdasarkan **tabel 3.2.20** pada indikator predikat akuntabilitas kinerja mencapai realisasi sebesar 71,70 atau predikat BB dan mengalami kenaikan realisasi pada 2024 sebesar 0,30 menjadi 72 dengan predikat BB dan Kembali

mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2025 sebesar 5 poin menjadi 77 dengan predikat BB. Adapun pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai realisasi sebesar 91,30 pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,40 persen menjadi 91,70% dan mengalami kenaikan realisasi lagi pada tahun 2025 sebesar 0,35 menjadi 92,05.

Berdasarkan **tabel 3.2.21** dapat dilihat sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat belum memiliki target kinerja pada dokumen renstra 2021-2026 dan baru memiliki target kinerja pada updating renstra tahun 2021-2026 yang dikeluarkan pada tahun 2023. Adapun capaian realisasi untuk indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2025 terhadap target renstra tahun 2026 yaitu 101,32% dan untuk indikator kinerja indeks kepuasan Masyarakat mencapai realisasi sebesar 99,95% terhadap target tahun Renstra tahun 2026.

Hambatan pada sasaran ini yaitu perencanaan yang kurang matang, keterbatasan data yang valid, koordinasi antar unit yang lemah, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan evaluasi kinerja. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan Upaya nyata yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Faktor pendorong dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja yaitu;

1. Komitmen Pimpinan yaitu berupa dukungan dan keteladanan pimpinan instansi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.
2. Perencanaan Kinerja yang jelas yaitu berupa adanya dokumen perencanaan (Renstra, RKT, IKU) yang terukur dan realistis.
3. Sistem Pengukuran Kinerja yaitu penggunaan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan berbasis hasil (outcome).
4. Penguatan Aparatur yaitu kompetensi SDM yang memadai melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu Digitalisasi proses pelayanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas.
6. Pengawasan dan Evaluasi yaitu Audit internal maupun eksternal yang konsisten.

7. Partisipasi Publik yaitu Keterlibatan Masyarakat dalam memberikan masukan, pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan.

Adapun faktor pendorong dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) yaitu:

1. Komitmen Pimpinan dan Aparatur yaitu berupa kepemimpinan yang visioner dan konsisten dalam mendorong pelayanan prima
2. Standar Pelayanan yang Jelas yaitu adanya standar pelayanan publik yang terukur (waktu, biaya, prosedur).
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu kompetensi pegawai melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu berupa digitalisasi layanan untuk memudahkan akses, transparansi, dan efisiensi.
5. Inovasi Pelayanan yaitu berupa penerapan ide-ide baru untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas layanan.
6. Sarana dan Prasarana yaitu berupa fasilitas pelayanan yang memadai, nyaman, dan ramah bagi semua kalangan.
7. Partisipasi dan Umpan Balik Masyarakat yaitu berupa mekanisme survei kepuasan masyarakat yang rutin dan transparan.
8. Pengawasan dan Evaluasi yaitu berupa monitoring kinerja pelayanan secara berkala.

Selain itu faktor pendorong dari sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Peningkatan IKM didukung oleh penerapan SOP pengujian bahan konstruksi yang jelas, kompetensi tenaga teknis laboratorium, serta ketersediaan peralatan pengujian. Selain itu, tersedianya fasilitas layanan laboratorium yang memadai, seperti ruang pelayanan, ruang tunggu, serta sarana pendukung administrasi, turut menunjang kenyamanan dan kepuasan pengguna layanan. Pelaksanaan survei IKM dan tindak lanjut hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.

Faktor penghambat dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja yaitu;

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu berupa Kompetensi aparatur belum

merata, terutama dalam pemahaman manajemen kinerja dan pelayanan publik.

2. Sistem dan Proses yaitu berupa Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP).
3. Kepemimpinan dan Komitmen yaitu berupa komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas kinerja belum konsisten.
4. Pengawasan dan Evaluasi yaitu berupa mekanisme monitoring dan evaluasi belum berjalan efektif.
5. Teknologi dan Infrastruktur yaitu berupa keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik.
6. Budaya Organisasi yaitu berupa rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja.
7. Efisiensi anggaran dan waktu APBD-P yang singkat.

Adapun faktor penghambat untuk indikator indeks kepuasan Masyarakat yaitu;

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu berupa kompetensi aparatur belum merata
2. Sarana dan Prasarana yaitu berupa fasilitas pelayanan publik yang terbatas atau tidak memadai.
3. Proses dan Regulasi yaitu berupa prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit.
4. Transparansi dan Akuntabilitas yaitu berupa mekanisme pengawasan internal dan eksternal belum efektif.
5. Partisipasi Masyarakat yaitu Tingkat literasi Masyarakat terhadap hak-hak pelayanan publik masih rendah
6. Budaya Organisasi yaitu Resistensi terhadap perubahan dan inovasi.

Adapun faktor penghambat lainnya yaitu Keterbatasan tenaga teknis bersertifikasi, kebutuhan peremajaan peralatan laboratorium, serta keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan. Di samping itu, fasilitas layanan laboratorium yang belum sepenuhnya memadai atau memerlukan peningkatan, seperti keterbatasan ruang pelayanan dan sarana pendukung, berpotensi memengaruhi kenyamanan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam mengatasi hambatan dalam sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja untuk indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu:

1. Menyusun Rencana Strategis yang jelas, terukur, dan berbasis hasil (outcome)
2. Melakukan publikasi laporan kinerja secara terbuka melalui website resmi atau media sosial
3. Melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap program memiliki target dan capaian yang jelas.
4. Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur agar lebih professional dan responsif.
5. Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital untuk memudahkan akses.
6. Melakukan **survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** secara berkala untuk mengukur kualitas layanan.
7. Memberikan penghargaan bagi unit kerja dengan capaian kinerja terbaik.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Perubahan

Pada awal tahun 2026 Dinas PUPR mengalami pemisahan Dinas menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2025.

Analisis capaian kinerja pada sasaran strategis perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yaitu;

3.3.1 Sasaran Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sasaran meningkatnya layanan infrastruktur pekerjaan umum memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ke PU an belum memiliki

target pada tahun 2025 atau memiliki target N/A dengan realisasi N/A karena belum memiliki metode perhitungan yang sesuai. Adapun sasaran ini mencakup beberapa realisasi bidang fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yaitu bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya.

3.3.2 Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel

Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel memiliki tiga indikator kinerja yaitu Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks), dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) dengan capaian kinerja tahun 2025, perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023-2025 dan perbandingan capaian terhadap target renstra 2021-2026, dan target renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2.22, 3.2.23, dan 3.2.24

Tabel 3.3.1 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	70,01	81,40	116,27%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91,9	92,05	100,16%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	77	102,67%

Sumber: Bidang Sekretariat, Bina Program dan Tata Ruang, UPTD WDP, dan UPTD LBK, 2025

Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	N/A	N/A	70,01	81,40	116,27%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91,30%	91,70%	91,90%	92,05%	100,16%
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72	77	75	77	102,67%

Sumber: Bidang Sekretariat, Bina Program dan Tata Ruang, UPTD WDP, dan UPTD LBK, 2025

Tabel 3.3.3 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Indikator Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks), dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)

No	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
			2023	2024	2025		
1.	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	0	N/A	N/A	81,40	71,01	114,63%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	0	91,30%	91,70%	92,05%	92,10%	99,95%
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0	72	77	77	76	101,32%

Sumber: Bidang Sekretariat, Bina Program dan Tata Ruang, UPTD WDP, dan UPTD LBK, 2025

Sasaran kedua pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yaitu Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel memiliki tiga indikator yaitu indikator Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai). Indikator ini mencapai realisasi 81,40 dengan persentase capaian sebesar 116,27% dengan kategori Menuju Informatif berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan dan Evaluasi Informasi Pusat Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Dinas PUPR Provinsi Jambi telah mengisi data pengadaan barang dan jasa pada aplikasi PPID dan melakukan pengisian kuisioner meliputi barang dan jasa pada bidang bina marga dan cipta karya yang memiliki anggaran terbesar pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Indikator Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai) ini belum memiliki target kinerja pada tahun 2021 hingga 2025 pada renstra 2021-2026 dan baru memiliki target kinerja pada updating Renstra tahun 2025-2029. Adapun capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2026 mencapai persentase capaian 114,63%.

Untuk pembahasan indikator kedua dan ketiga yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) telah dibahas pada sub bab 3.2.7 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja.

3.4. Capaian Program Penunjang Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki satu bidang yang tidak terdapat pada Sasaran Strategis yaitu Bidang Bina Konstruksi. Bidang Bina Konstruksi merupakan bidang atau fungsi yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan, dan pengembangan jasa konstruksi agar penyelenggaraan konstruksi berjalan aman, bermutu, efisien, dan berkelanjutan.

Bidang Bina Konstruksi sebagai capaian program penunjang kinerja pada Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2025 memiliki capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1 Capaian Program Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR
TA 2025**

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Ahli yang Bersertifikasi	100%	100%	100%
		Persentase Pekerjaan Konstruksi yang di kendalikan	60%	60%	100%

Sumber: Bidang Bina Konstruksi, 2025

**Tabel 3.4.2 Capaian Kegiatan Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR
TA 2025**

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Disertifikasi	120 Orang	120 Orang	100%
2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	3 Dokumen	0 Dokumen	0%

Sumber: Bidang Bina Konstruksi, 2025

Berdasarkan data **tabel 3.4.1** dapat dilihat bahwa sasaran program pada bidang Bina Konstruksi dengan indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Ahli yang Bersertifikasi telah mencapai realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian 100%. Adapun untuk indikator kinerja Persentase Pekerjaan Konstruksi yang dikendalikan mencapai realisasi sebesar 60% dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian program ini telah mencapai persentase realisasi

sebesar 100% dengan kategori capaian **Sangat baik atau dapat dikategorikan dengan warna hijau tua.**

Berdasarkan data **tabel 3.4.2** dapat dilihat bahwa kegiatan pada bidang Bina Konstruksi memiliki tiga kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli dengan target pada DPA yaitu 120 orang dengan realisasi 120 orang dengan persentase capaian sebesar 100%, kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi dengan target 5 dokumen realisasi 5 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100%. Adapun kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan target 3 dokumen dengan realisasi 0 dokumen dengan persentase capaian sebesar 0% hal ini dikarenakan efisiensi anggaran.

Faktor pendorong, penghambat dan Upaya nyata dari Bidang Bina Konstruksi selama tahun 2025 yaitu

- Faktor Pendorong
 - Tersedianya payung hukum seperti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya yang mewajibkan tenaga kerja bersertifikat
 - Adanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan
 - Kebutuhan Tenaga Ahli
- Faktor Penghambat
 - Adanya efisiensi pengurangan dana pada kegiatan
 - Jumlah instruktur dan asesor yang bersertifikat dan berpengalaman masih belum merata, terutama di daerah
 - Masih banyak tenaga kerja konstruksi yang belum memahami pentingnya pelatihan dan sertifikasi keahlian
- Upaya Nyata
 - Bekerja sama dengan BJKW Palembang II untuk membantu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi menggunakan dana APBN

3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai sasaran strategis (Program dan Kegiatan) dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	77,40%	97,57%	20,17%
		Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	101,60%	98,81%	2,78%
2.	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	82,729%	98,54%	15,81%
3.	Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	128,57%	97,84%	30,73%
4.	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	93,75%	87,31%	6,44%
5.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	10,09%	96,43%	86,34%
6.	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	96,66%	88,49%	8,17%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan	101,11%	97,75%	3,36%

No	Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	101,32%	90,06%	11,26%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100,16%	98,73%	1,44%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tahun 2025

Dari tujuh sasaran strategis, terdapat lima indikator yang persentase kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi telah mencapai kinerja sebesar 101,60% dengan efisiensi anggaran 2,78%.
2. Sasaran Meningkatkan Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik telah mencapai persentase capaian kinerja sebesar 128,57% dengan efisiensi anggaran sebesar 30,73%.
3. Sasaran Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan telah mencapai persentase capaian kinerja sebesar 101,11% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,36%.
4. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja telah mencapai persentase kinerja dengan capaian sebesar 101,32% dengan efisiensi anggaran sebesar 11,26%.
5. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai Persentase kinerja dengan capaian sebesar 100,16% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,44%.

3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2025 dinyatakan berhasil karena hasil/realisasi kinerja diatas target pada masing-masing target pada Renstra 2025 pada indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi, Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan, predikat akuntabilitas kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Selanjutnya untuk penyerapan anggaran secara keseluruhan pada Dinas PUPR Provinsi Jambi sebesar 96,68 % untuk seluruh indikator sasaran strategis pada perjanjian kinerja tahun 2025 yang mengampu 15 Program, 30 Kegiatan dan 98 sub kegiatan.

3.7. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Tindak Lanjut Tahun 2025

Tabel 3.6 Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP T.A 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyajikan informasi terkait faktor pendorong, penghambat, perbaikan kedepan, dan tindak lanjut atas perbaikan kedepan, dan tindak lanjut atas perbaikan kedepan dalam dokumen laporan monev Rencana Aksi	Sudah Menambahkan informasi terkait Faktor Pendorong, Penghambat yang terdapat pada aplikasi Paket dan menambahkan Perbaikan Kedepan dan Tindak Lanjut atas Perbaikan Kedepan dalam Dokumen Laporan
2.	Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi serta melakukan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada lingkup unit kerja	Sudah melakukan Pemberian Penghargaan pada ASN yang pernah mengikuti Diklat mendapatkan sertifikat dari Penyelenggara Sanksi bagi ASN yang tidak menginput e-kinerja adanya pemotongan pada tunjangan TPP
3.	Menyajikan informasi terkait upaya nyata dan/ atau hambatannya dalam pencapaian kinerja untuk seluruh rumusan indikator kinerja dalam laporan kinerja; dan	1. Telah Menambahkan informasi hambatan dan upaya pada masing-masing indikator kinerja yang telah dishare ke bidang-bidang; 2. Sudah rutin melakukan monitoring dan reviu secara berkala terhadap pencapaian kinerja;

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
4.	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang yaitu proses monev dilakukan secara bottom up	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah Melaksanakan Pelaporan data capaian kinerja secara berjenjang dimulai dari staff kepada Eselon IV, dilanjutkan ke Eselon III dan Eselon II; 2. Mengisi form data realisasi kinerja yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui oleh satu Tingkat di atasnya; 3. Sudah melakukan pelaporan data kinerja minimal tiga bulan sekali atau per triwulan paling lambat tanggal 10 pada awal triwulan; 4. Data Kinerja dijadikan dasar dalam melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan minimal per triwulan atau empat kali dalam satu tahun anggaran
5.	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai dan dimanfaatkan untuk perbaikan pengukuran kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah melakukan rapat evaluasi per triwulan yang membahas capaian kinerja; 2. Sudah melaksanakan evaluasi seluruh bidang dan menghimbau agar setiap bidang mengevaluasi kinerja setiap seksi pada bidang masing-masing; 3. Sudah melakukan pengukuran kinerja per triwulan yang hasilnya dapat dijadikan evaluasi yang dibahas dalam rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bagian

Sumber : Bidang Bina Program dan Tata Ruang, 2025

3.8 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2025 sebesar Rp 347.955.847.032,00 (96,68%) dari total anggaran yang dialokasikan.

1. APBD Belanja Operasi sebesar Rp 185.249.384.238,00 (98,27%)
2. APBD Belanja Modal sebesar Rp 162.706.462.794,00 (94,93%)

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut

**Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	28,27%	21,88%	77,40%	Rp 17.337.103.381,00	Rp 16.915.906.641,53	97,57%
		Persentase Kondisi Sistem Irigasi Provinsi dalam Kondisi Mantap	65,78%	66,83%	101,60%	Rp 5.635.220.932,00	Rp 5.568.264.360,00	98,81%
2.	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,87%	69,385%	82,729%	Rp 118.943.431.471,25	Rp 117.202.357.014,50	98,54%
3.	Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang berfungsi dengan baik	7 Unit	7 Unit	100,00%	Rp 100.413.781.770,00	Rp 98.248.582.447,00	97,84%
4.	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	80%	75%	93,75%	Rp 2.322.968.464,00	Rp 2.028.202.448,00	87,31%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	10,41 Hektar	1,05 Hektar	10,09%	Rp 46.919.502.017,00	Rp 45.243.002.675,00	96,43%
5.	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	85%	82,16%	96,66%	Rp 1.047.460.500,00	Rp 926.871.946,00	88,49%
		Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan	83,05%	83,97%	101,11%	Rp 4.644.367.800,00	Rp 4.539.855.132,00	97,75%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (76 Predikat)	BB (77 Predikat)	101,32%	Rp 52.482.390.685,53	Rp 47.264.088.730,00	90,06%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,90%	92,05%	100,16%	Rp 10.148.072.668,00	Rp 10.018.715.638,00	98,73%
Belanja Operasi						Rp 188.504.230.748,00	185.249.384.238,03	98,27%
Belanja Modal						Rp 171.390.068.941,00	162.706.462.794,00	94,93%
Jumlah dan Rata-Rata						Rp 359.894.299.689,00	347.955.847.032,03	96,68%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2025

BAB 4

Bab 4 berisi :

*Kesimpulan
Rencana Tindak
Lanjut*

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas PUPR Tahun 2021-2026 dan merupakan masa transisi baru dari Renstra 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2025 berdasar Perjanjian Kinerja Awal dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air”, dengan indikator Persentase Pengurangan Daya Rusak Air, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2025 adalah sebesar 21,88%, masih belum mencapai target 28,27% dengan capaian persentase kinerja yaitu sebesar 77,40%. Indikator kedua yaitu Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Realisasi kinerja Dinas PUPR dengan indikator Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 65,78%, dengan capaian persentase kinerja sebesar 101,60% dengan tingkat efisiensi anggaran untuk indikator persentase pengurangan daya rusak air sebesar 20,17% dan untuk indikator persentase kondisi sistem irigasi kewenangan Provinsi sebesar 2,78%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi”, dengan indikator Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan realisasi kinerja Dinas PUPR Tahun 2025 adalah sebesar 66,385% dengan persentase capaian kinerja yaitu sebesar 82,729% masih belum mencapai

target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 65,78% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,78%.

- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi”, dengan indikator Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah dengan realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2025 adalah 9 unit dengan persentase capaian kinerja sebesar 128,57%, Realisasi kerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 5 Unit, dengan efisiensi anggaran sebesar 30,73%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “ Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah”, dengan indikator Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang dengan realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2025 adalah sebesar 75% dengan persentase capaian kinerja 93,75%. Realisasi kerja Dinas PUPR belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 80%, dengan efisiensi anggaran sebesar 6,44%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman”, dengan indikator Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh. Realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2025 adalah sebesar 1,05 Ha dengan persentase capaian kinerja sebesar 10,09%. Realisasi kinerja Dinas PUPR belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 10,41 Ha, dengan efisiensi anggaran sebesar 86,34%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “ Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak”, dengan indikator “ Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan” realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2025 adalah sebesar 82,16% dengan persentase capaian kinerja 96,66%. Realisasi kerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 85%, dengan efisiensi anggaran sebesar 8,17%. Adapun untuk indikator “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Perdesaan” realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2025 83,97% dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,11%, dengan efisiensi anggaran sebesar 3,36%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator “Predikat Akuntabilitas Kinerja” realisasi kinerja

Dinas PUPR tahun 2025 adalah sebesar 77 Predikat atau BB Predikat dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,32%. Indikator ini telah mencapai target kinerja yaitu sebesar 75 Predikat dengan efisiensi anggaran sebesar 11,26%. Indikator kedua yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" realisasi kinerja sebesar 92,05% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,16%. Indikator ini telah melewati target kinerja sebesar 91,90% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,44%.

Adapun Hasil laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2025 berdasar Perjanjian Kinerja perubahan T.A 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari analisis sasaran perangkat daerah "Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum" dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur belum memiliki target kinerja dan realisasi kinerja karena masih belum menemukan metode perhitungan yang tepat.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah "Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel" dengan indikator "Hasil Monev Keterbukaan Badan Publik kategori PD (Nilai)" dengan realisasi kinerja Dinas PUPR Tahun 2025 adalah 81,40 dengan persentase capaian kinerja yaitu sebesar 116,27%. Indikator ini telah melewati target kinerja yaitu sebesar 70,01%. Indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi kinerja Dinas PUPR Tahun 2025 adalah 92,05% dengan persentase capaian kinerja yaitu sebesar 100,16%. Indikator ini telah melewati target kinerja yaitu sebesar 91,90%. Indikator ketiga yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) dengan realisasi kinerja Dinas PUPR Tahun 2025 adalah 77 Predikat dengan persentase capaian kinerja Dinas PUPR sebesar 102,67%. Indikator ini telah melewati target kinerja yaitu sebesar 75 Predikat.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Diperlukan sistem perencanaan yang lebih akurat sesuai dengan tingkat kebutuhan, serta mengantisipasi kebutuhan material jika terjadi kelangkaan dan permasalahan dalam pendistribusian material tertentu. Dengan demikian pengawasan bersifat teknis yang mengacu pada pengendalian mutu dan kualitas.

2. Perencanaan Program mengacu pada skala prioritas dan mengoptimalkan dana yang ada pada kegiatan yang sangat membutuhkan penanganan segera.
3. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan serta mengupayakan pendanaan semaksimal mungkin yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau lembaga terkait,
5. Melakukan pembenahan dan penataan ulang terkait aset data fisik maupun non fisik di bidang infrastruktur operasional.

LAMPIRAN 1
Lampiran 1. Matriks Renstra 2021-2026 (Tujuan/Sasaran)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-an yang Handal dan Berkelanjutan serta meningkatkan tata kelola Pemerintah yang baik	Meningkatnya Kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	%	77.36	78.92	82.243	83.87	85.25	85.25
	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.	%	59,87	62,8	64,51	65,78	67,14	67,14
		Persentase Pengurangan Kawasan Banjir dan Penanganan Daya Rusak Air di WS Kewenangan Provinsi	%	0	0	1.88	28.27	51.54	51.54
Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	13.90	0	2.3	10.41	16.79	16.79
	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Yang Layak Fungsi	Unit	0	0	5	7	7	7

	Terpenuhinya akses air minum layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	78.06	79,08	83.92	85	87	87
	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten	Orang	140	140	160	160	160	160
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Updating Renstra Periode 2021-2026

Kepala Dinas,



Lampiran 1. Matriks Renstra 2025-2029 (Tujuan/Sasaran)

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN TARGET	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ke P U an		2,56	2,61	2,66	2,71	2,76	indeks	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Kondisi jalan sedang+baik	74,70	74,98	75,56	76,14	76,85	77,35	%
			Persentase meningkatkan Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.		65,00	67,69	68,82	70,14	71,93	%	
			Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Provinsi yang dilindungi dengan Infrastruktur Sumber Daya Air	Luas Permukiman Rawan Banjir WS Provinsi yang dilindungi infrastruktur / Total Luas permukiman rawan banjir di ws kewenangan provinsi	2,74	17,48	52,31	76,54	82,86	%	
			Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Perpipaan, perkotaan dan perdesaan	2024 Kondisi Eksisting layanan air minum perpipaan sejumlah 281,056 SR atau 38% di targetkan pada tahun 2030 menjadi 401,710 SR atau 48 %	38,00	40,00	44,00	46,00	48,00	%	

- Indikator RPJMD;
- SPM Air Minum

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN TARGET	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
SPM Air Limbah			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak		68,84	70	71	73	74	75	%
			Persentase Peningkatan Ketersediaan TPS/TPA/TPS3R/TPST/SPAM di Kawasan Strategis Provinsi		10	10	20	30	40	50	%
			Persentase Ketersediaan TPA/TPST/SPALRegional		0	10	20	40	60	80	%
			Persentase Sistem Drainase Perkotaan yang di rehabilitasi		0	5	10	40	70	100	%
			Persentase Bangunan Gedung Strategis Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dipelihara dan dirawat		0	42,11	55,26	71,05	84,21	100	%
			Persentase Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dipelihara dan dirawat		0	42,11	55,26	71,05	84,21	100	%
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas lingkungan			Nilai Hasil TURBINLAK Serta kinerja Fungsi dan Manfaat Pada Penyelenggaraan Penataan Ruang			60	64	69	75	81	Skor
			Persentase Tenaga kerja konstruksi tingkat ahli yang bersertifikasi		100	20	40	60	80	100	%
			Persentase Pekerjaan Konstruksi yang di kendalikan		0	20	40	60	80	100	%

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN TARGET	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD : Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)		70,01	71,01	72,01	73,01	74,01	75	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		91,90	92,10	92,20	92,30	92,40	92,50	Nilai
<ul style="list-style-type: none"> Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas lingkungan SPM Perumahan dan Permukiman 	Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan		Nilai SAKIP Peringkat Daerah (Nilai)		75,00	76,00	77,00	78,00	78,50	79,00	Nilai
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan		68,84	70,39	71,95	73,51	75,07	76,63	%
SPM Perumahan		Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh		0,5	18,01	34,84	25,07	23,42	12,7	Ha
			Persentase Rumah Korban Bencana Alam / Rumah Terkena Program Pemerintah Yang Tertangani		0	20	40	60	80	100	%
			Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		30	33,33	50,00	66,67	83,33	100	%
			Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		0	33,33	50,00	66,67	83,33	100	%
Sasaran RPJMD : Terwujudnya birokrasi yang			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)		70,01	71,01	72,01	73,01	74,01	75,00	Nilai


NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN TARGET	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
berintegritas dan berbasis digital			Indeks Kepuasan Masyarakat		91,90	92,10	92,20	92,30	92,40	92,50	Nilai
			Nilai SAKIP Peringkat Daerah (Nilai)		75,00	76,00	77,00	78,00	78,50	79,00	Nilai

Sumber: Rankhir Renstra 2025-2029

Kepala Dinas,



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Awal 2025


Provinsi Jambi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Salah satu kewajiban merupakan penjabaran yang akurat, komprehensif dan akurat serta berorientasi pada hasil, serta yang berdasar Undang-Undang No. 32/2004/PUU


Nama : MUZAKIR, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI


Sekretaris Daerah Pihak Pertama

Nama : DR. H. H. HAKIS, S.SOS, M.M
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku dalam pelaksanaan, sekretaris daerah pihak kedua Pihak pertama telah akan melakukan tugas-tugas yang ada di bawah koordinasi dan bimbingan langsung dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jambi.

Pihak kedua akan melakukan secara yang akurat serta yang dilakukan melalui metode-capaian kerja dan perjanjian ini dan merupakan program yang dapat dilaksanakan dengan penganggaran dan waktu.

Pihak Kedua

DR. H. H. HAKIS, S.SOS, M.M
GUBERNUR JAMBI

Pihak Pertama

MUZAKIR, M.Si
PENYAMA T.C.1/2025
NIP. 19730202200411033

Jambi, 9 Juli 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

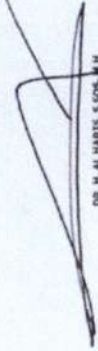
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	28,27 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Kode Etik Pegawai Pemerintah	65,78 %
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Kode Etik Pegawai Pemerintah	83,87 %
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Bantuan Keuangan Strategis Daerah yang Berfungsi dengan baik	7 unit
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Keuangan	80 Persen
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	18,41 Persen
7	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	85 %
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	83,52 %
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	76 Persen
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	91,9 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSAMAAN	1.267.528.800	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAUNDAE	4.332.567.800	
3	PROGRAM KAWALAN PERSAMAAN	14.119.735.600	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	41.277.223.918	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERIRIGAN AIR RUMAH	1.636.142.400	
6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERAIRAN REGIONAL	611.538.400	
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.411.298.600	
8	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	79.906.522.965	
9	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	126.990.802.325	
10	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	3.345.303.372	
11	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	5.363.472.005	
12	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	1.798.868.250	
13	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	28.615.664.514	
14	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	46.517.620.496	
15	PROGRAM PENGELOLAAN BANGUNAN ZEDONG	3.431.847.475	


Jambi, 8 Juli 2025

GUBERNUR JAMBI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI


DR. H. AL HARIS S. SIDIQ, H.
GUBERNUR JAMBI


MUZAKIR, H. SI
PENYUSUN TCI (TKR)
NIP. 137303296694203


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUZAKIR, M.Si., M.M.**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

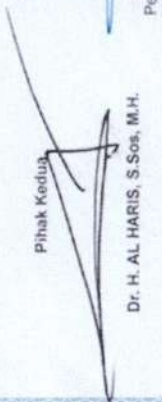
Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**
Jabatan : **Gubernur Jambi**


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Jambi, November 2025
Pihak Pertama,


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.


MUZAKIR, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (W/c)
NIP. 19730302 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A
2.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,01 91,90 75

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG LIRUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 60.014.791.425,53	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 22.972.324.133,00	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERAWATAN AIR MINUM	Rp 1.047.460.500,00	APBD
4.	SISTEM DAN PENGELOLAAN PERAIRAN REGIONAL	Rp 217.167.400,00	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 250.425.000,00	APBD
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 4.176.774.600,00	APBD
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp 306.626.198,00	APBD
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 97.735.196.492,00	APBD
9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 2.341.959.120,00	APBD
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 777.594.925,00	APBD
11.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 13.760.193.310,00	APBD
12.	PROGRAM PENINGKATAN PRAGARANA, SARANA DAN UTILITAS LAMUM (PSU)	Rp 32.381.713.862,22	APBD
13.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Rp 116.843.431.471,25	APBD
14.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 2.015.671.937,00	APBD
15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 2.322.969.464,00	APBD

Gubernur Jambi,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Dinas,



Lampiran 3. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Awal 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengurangan Daya Rusak Air	28,27%	21,88%	77,40%
		Persentase Kondisi Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	65,78%	66,83%	101,60%
2	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,87%	69,385%	82,729%
3	Meningkatnya Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang Berfungsi dengan Baik	7 Unit	9 Unit	128,57%
4	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	80,00%	75,00%	93,75%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	10,41 Ha	1,05 Ha	10,09%
6	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	85,00%	82,16%	96,66%
		Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, Perkotaan dan Perdesaan	83,05%	83,97%	101,11%
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja	76 Predikat	77 Predikat	101,32%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,90%	92,05%	100,16%

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2025

Kepala Dinas,



Lampiran 3. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025 terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Awal 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A	N/A	N/A
2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Hasil Money Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	70,01	81,40	116,27%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91,90	92,05	100,16%
		Nilai SAKIP Peringkat Daerah (Nilai)	75	77	102,67%

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2025

Kepala Dinas,



Lampiran 4. LHE AKIP Dinas PUPR TA 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Tulakarya, Jambi
Telp. (0141) 51906 - Fax. (0141) 62317, Website: www.inspektordasda.jambi.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025

NOMOR : LAP.709/431/ITPROV-4VI/2025
TANGGAL : JUNI 2025
TENTANG : HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
JAMBI TAHUN 2024
TAHUN : 2025

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian sistematis dan terintegrasi aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklasifikasian, penghisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Selain itu, SAKIP juga merupakan sistem manajemen yang menerapkan siklus *Planning, Do, Check dan Act (PDCA)* dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana unit kerja organisasi secara mandiri merekrut, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya dalam bentuk umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continuous improvement*).

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Pencapaian dan peningkatan kinerja secara konsisten (*mission*) masing-masing unit kerja pemerintah daerah sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah, maka secara menyeluruh pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran kinerja pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum Evaluasi

- Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rêvisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 728/KEP GUBSETDA.ORG-2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Pemerintah Provinsi Jambi;
 - 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;
 - 7) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 185/KEP GUBSETDA.ORG-2/2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Tugas dan Tanggung Jawab Tugas Dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;
 - 8) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5/KEP GUB/ITPROV-1/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Surat Tugas Inspektur Provinsi Jambi Nomor B.700_1035/ITPROV-1.31V/2025 Tanggal 14 April 2024 tentang Melaksanakan Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. Ruang Lingkup Evaluasi

- Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi, antara lain:
1. Penilaian perencanaan kinerja atas ketersediaan dan kualitas dokumen, serta pemanfaatan dokumen untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 2. Penilaian pengukuran kinerja berjalan dan berkelanjutan;
 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dan
 4. Penilaian akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan terdistribusi dalam peningkatan implementasi SAKIP

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemudahan) serta kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, yaitu:

1. **Checklist Pengumpulan Data dan Informasi**
Bersis Pengumpulan Data dan Informasi berupa penyerahan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan diperiksa oleh Perangkat Daerah secara mandiri. Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen



- Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Tehnis Tanya Jawab Sederhana merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan kegiatan percayaa secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan chat.
- Observasi
Tehnis observasi dilakukan dengan cara mengamati terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

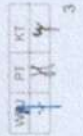
Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan pemukiman rakyat;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan pemukiman rakyat;
- Pemantauan dan pelaksanaan kebijakan teknis, operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran dan rumusan indikator sebagaimana dalam Renstra 2021-2026 sekaligus sasaran tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Memperbaiki Kualitas Jalan Provinsi dan Perumahan di Kota-kota Madya	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik
Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Persentase Pengurangan Kawalan Banjir dan Penanganan Daya Rusak Air di WS Kewenangan Provinsi
Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Memperbaiki Keteraturan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Persediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi yang Layak Fungsi
Terperuncinya Akses Air Minum Layak	Persentase rumah tangga dengan akses bersih terhadap air minum layak, kesehatan dan keselamatan
Memperbaiki Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Rasio Tenaga Konstruksi yang Kompeten
Memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Memperbaiki Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (PAK)



Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Memperbaiki Kualitas Jalan Provinsi dan Perumahan di Kota-kota Madya	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	82,243%
Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase persentase indeks kewenangan Provinsi	64,51%
Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	1,88%
Memperbaiki Keteraturan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Persediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi yang Layak Fungsi	2,3 Ha
Terperuncinya Akses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Bersih terhadap Air Minum Layak, Kesehatan dan keselamatan	5 Unit
Memperbaiki Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Rasio Tenaga Konstruksi yang Kompeten	83,62%
Memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	54%
Memperbaiki Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	91,6%
		BB

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024 tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp99.478.435.124,00 yang digunakan untuk melaksanakan 13 Program dengan 25 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Penilaian implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memerang perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik akuntabel, berkinerja baik, mematu sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, saat ini belum memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pelatnggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak memadai



No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
6	C	>30-50	Kurang sistem dan tahapan kurang dapat diandalkan menjadi sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang sistem dan tahapan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi atau implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai 72,00 predikat "BB" dengan interpretasi "Sangat Baik". Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen (%)	Bobot Sub-Komponen		Total Nilai
			Ketercapaian (%)	Pencapaian (Poin)	
1	Pencapaian Kinerja	30%	5,40	7,20	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	4,20	5,40	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15%	2,70	3,60	2,25
4	Evaluasi Kinerja Internal	25%	3,00	5,25	7,50
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA					72,00

H. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah merencanakan, merekomendasi dengan upaya mengupload dokumen perencanaan kinerja dan meningkatkan kinerja. Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi AKIP Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran kertas kerja perhitungan capaian kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan rekomendasi rekomendasi dengan menyerahkan laporan kinerja dengan menyertakan lampiran kertas kerja perhitungan capaian kinerja	Keterangan Selesai
2	Menyusun perjanjian kinerja dengan indikator kinerja yang SMART pada level unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan indikator yang SMART pada level unit	Selesai

UJ PT KT
5

3	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Dinas PUPR telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja melalui website E-Money (e-money.pupr.jambiprov.go.id), E-Propors (program.jambiprov.go.id)	Selesai
---	--	---	---------

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Kriteria/Warna
Memperbaiki Kualitas Jalan Perantara Kondisi Mantap	Persentase Jalan Perantara dalam Kondisi Mantap	Persen	80.243	74,70%	Hijau Muda
Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengolahan Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya indeks kondisi sistem pengolahan Sumber Daya Air	Persen	64,61	62,49%	Hijau Tua
	Persentase Pengurangan Kawasan Bayur dan Penangana Daya Rusak Air di WNS	Persen	1,88%	0,00%	Merah
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumbuh	Pengurangan Luas Kawasan Perumahan Kumbuh	Ha	2,3 Ha	1,25 Ha	Kuning Muda
Memperbaiki ketertinggalan dan kualitas bangunan Gedung Struktural Daerah Provinsi	Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Struktural Daerah Provinsi yang Layak	Unit	5 Unit	3 Unit	Kuning Muda
Terperbaikinya Akses Minum Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses	Persen	85,92	80,02%	Hijau Tua

UJ PT KT
6

No	Komponen	Bobot	Nilai	Berkas	
				1	2
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,00	80	80
1.a	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80	80	80
1.b	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (calculation) disertai level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	80	80
1.c	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80	80
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,80	75	75
2.a	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjangka dan berkelanjutan	6,00	4,80	80	80
2.b	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyelesaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	9,00	7,20	80	80
2.c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyelesaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	70	70
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,00	80	80
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80	80
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar mengambarkan Kualitas atas Pelaksanaan Kinerja, informasi esensial dan kegiatan kinerja serta upaya perbaikan yang pernah dilakukannya	4,50	3,60	80	80

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2024

2. HASIL EVALUASI

Nilai evaluasi AKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian masing-masing komponen dan sub-komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,00
1.a	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80
1.b	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (calculation) disertai level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20
1.c	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,80
2.a	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjangka dan berkelanjutan	6,00	4,80
2.b	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyelesaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	9,00	7,20
2.c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyelesaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar mengambarkan Kualitas atas Pelaksanaan Kinerja, informasi esensial dan kegiatan kinerja serta upaya perbaikan yang pernah dilakukannya	4,50	3,60

WT PT KT
1 2 3 4 5 6 7

No	Komponen	Bobot	Nilai
3.c	Pelaporan kinerja telah membeikan dampak yang besar dalam pencapaian strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja terwujudnya	7,50	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	26,00	18,50
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	5,00	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	12,50	10,00

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024 memperoleh nilai 77,00 predikat "BB" dengan interpretasi "Sangat Baik". Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**
Perencanaan kinerja memperoleh nilai 24,00 dan bobot nilai 30. Hal ini menunjukkan belum seluruh kriteria penilaian kinerja terpenuhi. Urutan lebih rinci pemenuhan kriteria sebagai berikut:

a. **Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja**

1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/Kep Gub/Setda/Org-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Provinsi Jambi Tanggal 16 Agustus 2022.
2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025.
3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek/tahunan yaitu Renja Tahun 2024 dan Perubahannya Renja Tahun 2025, dan Pohon Kinerja.
5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi Tahun 2024 dan 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan 2025, dan 2025, Crosscutting Kinerja Tahun 2024 dan 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025.
6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu DPA Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya dan DPA Tahun 2025.

b. **Kualitas Perencanaan Kinerja**

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan/ditetapkan diantarnya Renstra Perubahan 2021-2026, Renja Tahun 2024 beserta perubahannya, Renja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pohon Kinerja, Crosscutting, Cascading Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan 2025, serta DPA beserta perubahannya.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi esr.menpan.go.id dan website E-SAKIP diantarnya, Renstra 2021-2026,

WT PT KT
1 2 3 4 5 6

- Rencana, Rencana Aksi, Pohon Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja, dan Perjanjian Kinerja, DPA.
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra sudah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah.
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelompok (*sustainable/berdihik*) dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - adeg yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.
 - Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
 - Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
 - Setiap unit kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu pegawai eselon 2 s.d 3, seluruh pegawai fungsional dan struktural telah membuat perencanaan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK); dan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang Pegawai struktural, fungsional dan staf menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja

c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai yaitu pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2024 jumlah anggaran sebesar Rp896.478.435.124,00.
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.
- endapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang dilakukan dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yaitu langkah perbaikan kinerja tertuang di Renja dan Perangkat Daerah/unit kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Penetapan IKU, PK Eselon 2 dan 3 serta seluruh Pegawai sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran.

Adapun menjadi catatan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat perbedaan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III yang melebihi dari PK Eselon II, sebagai contoh:
 - Pada Kabid Bina Marga, Indikator Kinerja Meningkatkan kualitas jalan provinsi, pada Eselon II target 82,243% sedangkan Eselon III target 85,325%.
 - Pada Kepala UPTD Workshop dan Perawatan, Indikator Kinerja Rasio tenaga kerja kontinuasi berkompeten, pada Eselon II target 54% sedangkan Eselon III target 50%.
- Laporan Morev Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 belum berkualitas evaluasinya (tidak ada faktor pendorong, penghambat, perbaikan kedepan, dan tindak lanjut atas perbaikan kedepan).

VP	PT	KT
✓	✓	✓

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai 22,50 dari bobot nilai 30. Hal ini menunjukkan belum seluruh kriteria penilaian kinerja terpenuhi. Uraian lebih rinci pemenuhan kriteria sebagai berikut:

a. Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yaitu pada dokumen IKU yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 08/KPSPD/PP/PR/2024 tanggal 31 Januari 2024; dan
- Terdapat mekanisme yang jelas tentang pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja Nomor S-162/DPP/PP/2023 1/2025 Tanggal 21 Januari 2025.

b. Kualitas Pengukuran Kinerja

- Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja yaitu terdapat lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu terdapat Laporan Morev Renja Triwulan 1, 2, 3 dan 4 yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang disertai notulensi dan dokumentasi pengukuran kinerja triwulan.
- Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yaitu terdapat laporan morev triwulan 1,2,3 dan 4 disertai dengan daftar hadir dan diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan
- Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi yaitu aplikasi e-Paket <http://paket.jambiprov.go.id>, SKP Online (<http://skp.jambiprov.go.id>), e-Kinerja <http://ikinerja.bkn.go.id> SIPD Kemendagri <https://sipd.kemendagri.go.id>, Aplikasi e-Sakip <http://esakip.manajemen.go.id>

c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar penyusunan (pemboran/pengurangan) lunjangan kinerja/penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 255/KEP.GUB/BKD-5.1/2025 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 412/KEP.GUB/INSPEKTORAT/2024 tentang Pemberian Sanksi dan Penghargaan.
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan (*Refocusing*) Organisasi yaitu dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan atau perubahan (Renja Perubahan) terdapat penyusunan dalam target.
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yaitu LK menginformasikan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan; dan
- Setiap unit kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, yaitu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dan pelaporan serta penilaian kinerja individu setiap bulan.

VP	PT	KT
✓	✓	✓

Adapun kriteria yang belum terpenuhi dan menjadi catatan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan informasi terkait faktor keberhasilan capaian kinerja, hambatan dan upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja, dan
2. Pengukuran Kinerja Hasil pengukuran kinerja belum dimantapkan sebagai pemberian sanksi dan penghargaan dan dasar pengambilan keputusan pada unit kerja/perangkat daerah.

3). Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja memperoleh nilai 12,00 dan bobot nilai 15. Hal ini menunjukkan belum seluruh kriteria penilaian kinerja terpenuhi. Uraian lebih rinci pemenuhan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja**
1. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 telah disusun;
 2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
 3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu LKJ telah difandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai stempel Perangkat Daerah;
 4. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada aplikasi esr merpan go.id dan
 5. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu yaitu tanggal 20 Januari 2025 kepada Sekda cq. Kepala Biro Organisasi.

- b. Kualitas Pelaporan Kinerja**
1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yaitu penyusunan LKJ sesuai dengan PermennPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revu/Ass Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yaitu pada bab III (LKJ) telah menyajikan capaian kinerja dengan target tahunan;
 3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan
 7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- c. Kualitas Pemenuhan Pelaporan Kinerja**
1. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan;
 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
 3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; dan
 4. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 18,50 dan bobot nilai 26. Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya kriteria penilaian kinerja terpenuhi. Uraian lebih rinci pemenuhan kriteria sebagai berikut:

SK	PT	KT
4	4	4

- a. Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
1. Terdapat pedoman, teknis, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 1309-KPTS/DUPR/3.3/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024;
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada unit kerja; dan
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

- b. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang ada; dan
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada unit kerja.

- c. Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan; dan
 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Adapun kriteria yang belum terpenuhi dan menjadi catatan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI) belum dilakukan dengan pendalaman yang memadai dan belum dimantapkan untuk mendukung pengukuran kinerja.

- 5). Evaluasi atas Capaian Kinerja**
- Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan keagagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terdistribusi dari capaian 8 (Delapan) sasaran strategis dan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi dan kebijakan, peningkatan capaian program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.
- Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- 3. REKOMENDASI**
Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengaktifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi terkait faktor pendorong, penghambat, perbaikan kedepan, dan tindak lanjut atas perbaikan kedepan dalam dokumen laporan money Rencana Aksi;
- 2) Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi serta melakukan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada lingkup unit kerja;
- 3) Menyajikan informasi terkait upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian kinerja untuk seluruh rumusan indikator kinerja dalam laporan kinerja; dan
- 4) Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang yaitu proses money dilakukan secara bottom up
- 5) Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai dan dimanfaatkan untuk perbaikan pengukuran kinerja.

SK	PT	KT
4	4	4

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 adalah 77,00 predikat "BB" dengan Interpretasi "Sangat Baik".

b. Saran

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan merupakan tanggung jawab pimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Sebagai upaya mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan, pimpinan unit kerja dapat memberikan penghargaan dan sanksi pada lingkup unit kerja yang dipimpinnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menggarisbawahi segala upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP yang baik, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



H. AGUS HERIANTO, S.H., O.GIA, CGCAE, QRMP
Provinsi Jambi Madya
NIP. 19890819 199703 1 004



Kepala Dinas,



MUZAKIR, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730302 200604 1 003

Matriks TL LHE TA 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
 PROGRES PERBAIKAN IMPLEMENTASI SAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1.	Menyajikan informasi terkait faktor pendorong, penghambat, perbaikan kedepan, dan tindak lanjut atas perbaikan kedepan dalam dokumen laporan money Rencana Aksi	Menambahkan informasi terkait faktor pendorong, penghambat yang terdapat pada aplikasi Paket dan menambahkan perbaikan kedepan dan tindak lanjut atas perbaikan kedepan dalam dokumen laporan	Dokumen Laporan Money Rencana Aksi telah menyampaikan faktor pendorong, penghambat yang terdapat pada aplikasi Paket dan menambahkan perbaikan kedepan yang telah diisi oleh masing-masing bidang.	Januari-Desember 2025	Bidang Bina Program dan Tata Ruang Seksi Monitoring dan Evaluasi, beserta semua seksi.	Proses komunikasi dan konsultasi dengan bidang lain
2	Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi serta melakukan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada lingkup unit kerja,	Pemberian penghargaan pada ASN yang pernah mengikuti Dilat mendapatkan sertifikat dari Penyelenggara Sanksi bagi ASN yang tidak menginput e-kinerja adanya pemotongan pada tunjangan TPP.	Yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali selama tahun 2024 Dan di tahun 2025 sebanyak 2 kali	Bulan Januari – Desember 2024 Bulan Januari- Agustus 2025	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Selesai
3	Menyajikan informasi terkait Upaya nyata dan/ atau hambatan dalam pencapaian kinerja untuk seluruh rumusan indikator kinerja dalam laporan kinerja, dan	1. Menambahkan informasi hambatan dan Upaya pada masing2 indikator kinerja yang telah dishare ke bidang-bidang 2. Rutin melakukan monitoring dan reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja.	Laporan Kinerja yang telah di tambah Upaya nyata dan hambatan dan pencapaian kinerja	Januari-Desember 2025	Bidang Bina Program dan Tata Ruang Seksi Monitoring dan Evaluasi beserta semua seksi.	Proses komunikasi dan konsultasi dengan bidang lain

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
4	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang yaitu proses monev dilakukan secara <i>bottom up</i>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelaporan data capaian kinerja secara berjenjang dimulai dari staff kepada Eselon IV, dilanjutkan ke Eselon III dan Eselon II Mengisi form data realisasi kinerja yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui oleh satu Tingkat diatasnya. Para bidang dapat melaporkan data kinerja minimal tiga bulan sekali atau per triwulan paling lambat tanggal 10 pada awal triwulan Data kinerja dijadikan dasar dalam melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan minimal per triwulan atau empat kali dalam satu tahun anggaran 	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dilakukan secara efektif dan berjenjang dengan pendekatan Bottom-up yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua level organisasi.	Januari-Desember 2025	Bidang Bina Program dan Tata Ruang Seksi Monitoring dan Evaluasi beserta semua seksi.	Proses komunikasi dan konsultasi dengan bidang lain
5	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai dan memanfaatkan untuk perbaikan pengukuran kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat evaluasi per triwulan yang membahas capaian kinerja. Melaksanakan evaluasi seluruh bidang dan diimbau agar setiap bidang mengevaluasi kinerja setiap seksi pada 	Rutin melakukan pengukuran data pada aplikasi e-kinerja, e-lppk dan aplikasi PAKET.	Januari-Desember 2025	Bidang Bina Program dan Tata Ruang Seksi Monitoring dan Evaluasi beserta semua seksi.	Proses komunikasi dan konsultasi dengan bidang lain

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
		3. Hasil pengukuran kinerja per trwulan dapat dijadikan evaluasi yang dibahas dalam rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bagian.				

Mengetahui,
Kepala Dinas,



Muzakir, M.Si., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730302 200604 1 003

Kepala Dinas,



MUZAKIR, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730302 200604 1 003

Lampiran 5. Penghargaan yang Pernah Diterima



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
NOMOR : 01/KEP-KI/JBI/XII/2025

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jambi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi Jambi;
 - bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik di Provinsi Jambi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jambi Tahun 2025;

- Memutuskan :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2);
 - Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 25);
 - PERKEI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 12 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik Provinsi Jambi tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolak ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi ini.

KETIGA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Desember 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 01/KEP-KI/JIBI/XII/2025
 TENTANG
 HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
 INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK PROVINSI
 SE JAMBI TAHUN 2025

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 PADA BADAN PUBLIK SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

1. Badan Publik Informatif

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi	99,92
2	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	99,90
3	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi	99,85
4	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJTB) Jambi	99,80
5	KPU Provinsi Jambi	97,40
6	BAWASLU Provinsi Jambi	96,92
7	Balai Penerapan Modernisasi Perumahan Jambi	96,80
8	Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi	96,76
9	Kejaksaan Tinggi Jambi	96,60
10	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi	96,44
11	Gorontalo Jawa Keuangan (GJK) Provinsi Jambi	94,36
12	Balai Bahasa Provinsi Jambi	94,24
13	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi	94,00
14	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi	93,04
15	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi	91,60
16	Badan Keperndudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKB) Provinsi Jambi	90,08
17	BPS Keresahan Provinsi Jambi	90,06
18	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi	90,00

Kategori Vertikal Kab/Kota

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Pengadilan Agama Muaro Bulian	99,80
2	Pengadilan Agama Kota Jambi	98,84
3	Pengadilan Agama Bungo	96,72
4	Pengadilan Agama Sarolangun	90,48
5	Pengadilan Agama Muaro Sabak	90,00
6	Kementerian Agama Sarolangun	94,04
7	Kementerian Agama Kerinci	90,60
8	Kementerian Agama Bungo	90,34
9	Kementerian Agama Tanjung Barat	90,08
10	Kementerian Agama Tanjung Timur	90,00
11	Badan Pusat Statistik Muaro Jambi	99,80
12	Badan Pusat Statistik Tebo	99,60
13	Badan Pusat Statistik Sungai Penuh	99,40
14	Badan Pusat Statistik Merangin	99,20

15	Badan Pusat Statistik Kerinci	99,20
16	Badan Pusat Statistik Sarolangun	99,00
17	Badan Pusat Statistik Tanjung Barat	99,00
18	Badan Pusat Statistik Bungo	99,00
19	Badan Pusat Statistik Kota Jambi	98,52
20	Badan Pusat Statistik Tanjung Barat	98,36
21	Badan Pusat Statistik Batang Hari	98,32

Kategori PPID Daerah Provinsi Jambi

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Inspektorat Provinsi Jambi	99,80
2	Dinas Pendidikan	99,48
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	99,32
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	97,88
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	95,80
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	95,76
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	95,48
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	95,40
9	Dinas Sosial, Keperndudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	94,32
10	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	92,72
11	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	92,44
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	90,92
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	90,16
14	Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan)	90,00
15	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	90,00

Kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PPID Utama Kota Jambi	98,36
2	PPID Utama Sarolangun	97,64
3	PPID Utama Tanjung Timur	96,60
4	PPID Utama Muaro Jambi	95,40
5	PPID Utama Kerinci	92,12
6	PPID Utama Tebo	90,30
7	PPID Utama Bungo	90,20
8	PPID Utama Tanjung Barat	90,00

Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PERUMDA Tirta Mayang Kota Jambi	90,60

Pemerintahan DESA		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Sumber Agung	97,40
2	Purwobakti	96,52
3	Aur Duri	93,56
4	Muarosunggen	90,2

2. Badan Publik Menuju Informatif

Kategori Instansi Vertikal Provinsi		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Jambi	87,80
2	Komando Resort Militer 042/Cairanda Putih	80,00

Kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi	89,84
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	86,20
3	Rumah Sakit Umum Raden Mattaher	85,96
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	85,60
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Provinsi Jambi	85,48
6	Badan Kerjasama Daerah Provinsi Jambi	85,48
7	Dinas Kerajinan Pangan Provinsi Jambi	82,04
8	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	81,40
9	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	80,12

Kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PPID Utama Sungai Penuh	81,80

Kategori Pemerintahan DESA

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Tegal Rejo	87,68
2	Pasar Singgih	82,04

3. Badan Publik Cukup Informatif

Kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Dinas Penataan Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi	78,68
2	Dinas Kependidikan dan Olahraga Provinsi Jambi	78,16
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	77,88
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	77,00
5	Dinas Perhubungan	65,00

Kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PPID Utama Merangin	76,60
2	PPID Utama Batang Hari	60,00

4. Badan Publik Kurang Informatif

Kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	41,60
2	Rumah Sakit Jwa Daerah Kol. INF. H. M. Syukur Jambi	41,20

5. Badan Publik Tidak Informatif

Kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	37,80
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	35,40
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi	26,80
4	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	15,60



MURTI JAMFIO HELMI, SP.,M.Sos



Kepala Dinas,

